

**EGALITER HAK BERPOLITIK ANTARA LAKI-LAKI DAN
PEREMPUAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF DI INDONESIA**



Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh

Ardiansyah

NPM. 1321020097

Program Studi : Siyasah (Hukum Tata Negara)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H/2018 M**

EGALITER HAK BERPOLITIK ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh

ARDIANSYAH
NPM. 1321020097

Program Studi : Siyasah (Hukum Tata Negara)

Pembimbing I : Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.

Pembimbing II : AgustinaNurhayati, S.Ag., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H/2018 M**

ABSTRAK

EGALITER HAK BERPOLITIK ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Oleh :
Ardiansyah

Perempuan dan laki-laki diciptakan Allah SWT dengan kedudukan yang sama, namun di Indonesia laki-laki lebih sering berdiri di dunia politik dibandingkan perempuan terlebih dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai sedikitnya kuota perempuan dalam jabatan politik. Dalam hukum positif egaliter hak berpolitik dijelaskan dalam peraturan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, di dalam Pasal 27 (1), pasal 28 D ayat (1) dan (2), dan pasal 28 I ayat (2) dijelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan yang sama, Sedangkan menurut hukum Islam, Al-Quran dan hadis tidak ada secara jelas mengatur tentang kuota perempuan dalam jabatan politik tetapi ada yang menjelaskan bahwa dalam firman Allah Q.S Al- Hujarat (49) ayat 13 perempuan dan laki-laki itu sama dimata Allah SWT. Perempuan dan laki-laki adalah makhluk yang diciptakan Allah dengan kedudukan yang sama, perempuan dan laki-laki mempunyai kelebihan dan kedudukan masing-masing.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana egaliter hak berpolitik antara laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam dan hukum positif dan bagaimana persamaan dan perbedaan egaliter hak berpolitik antara laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam dan hukum positif. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memperoleh serta memperluas wawasan dalam egaliter hak berpolitik antara laki-laki dan perempuan yang terjadi dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif adalah

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Kemudian data yang terkumpul diolah melalui proses editing, coding dan rekonstruksi data sehingga menjadi bentuk karya ilmiah yang baik. Sedangkan analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif analitis dengan pendekatan berpikir komparatif.

Hasil penelitian yang didapat, egaliter hak berpolitik antara laki dan perempuan dalam hukum Islam, dalam Islam tidak diterangkan secara jelas mengenai kuota perempuan dalam jabatan politik, tetapi firman Allah menjelaskan bahwa kedudukan perempuan dengan laki-laki sama, Sedangkan dalam hukum positif, dalam konteks demokrasi, baik laki-laki maupun perempuan berhak memiliki hak politik, bahkan sangat dilindungi oleh berbagai perangkat hukum dan undang-undang. Egaliter hak berpolitik antara laki-laki dan perempuan baik dalam hukum Islam dan hukum positif mempunyai persamaan yaitu tidak membedakan laki-laki dan perempuan, yang pada dasarnya perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk terlibat dalam dunia politik. namun terdapat perbedaan yaitu dalam Islam tidak membedakan membedakan antara laki-laki dan perempuan untuk berpolitik, sedangkan dalam hukum positif ada pembatasan tentang kuota jumlah perempuan dan laki-laki dalam berpolitik yaitu yang diatur dalam dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pada Pasal 55.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara.

Nama : Ardiansyah
NPM : 1321020097
Jurusan : Siyasah
Fakultas : Syari'ah
**Judul Skripsi : EGALITER HAK BERPOLITIK ANTARA LAKI-LAKI
DAN PEREMPUAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Hj Erina Pane, S.H., M.Hum.
NIP. 19700502200003201

Pembimbing II

Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.
NIP. 197408162003122004

Ketua Jurusan Siyasah

Drs. Susiadi, M.Sos.I
NIP. 195808171993031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGSAHAN

Skripsi dengan judul “**EGALITER HAK BERPOLITIK ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

”,disusun oleh**Nama: Ardiansyah, NPM. 1321020097, Program Studi :
Siyasah (Hukum Tata Negara), telah diujikan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: Rabu,
3 Oktober 2018.**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Frenki, M.SI

Sekretaris : Muhammad irfan., S.H.I., M.Sy

Penguji I : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.

Penguji II : Dr. Hj Erina Pane, S.H., M.Hum

**Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung**

**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP.197009011997031002**

MOTTO

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

artinya: dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S At Taubah Ayat 71) ¹

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid & Terjemah, (Bandung : Diponegoro, 2013), h. 158

PERSEMBAHAN

Dengan ini segala syukur kepada Allah yang Maha Esa dan atas dukungan dan doanya akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Ayahanda Asnawi A.F dan Ibunda Nurhayati yang senantiasa dan tiada henti-hentinya mendukung, menyayangi, menemaniku dan membantuku serta mendo'akan keberhasilanku, membesarkanku dengan do'a dan jasa-jasanya yang tak terbilang demi keberhasilan cita-citaku. Aku semakin yakin bahwa ridha Allah SWT adalah keridhaanmu.
2. Keluargaku, Kakak-kakak ku tercinta Mulyadi, Srijuwita, Riski Amelia, yang telah membantu materil maupun moril dan yang telah memberikan semangat disetiap saat, semoga Allah juga kabulkan mimpi, cita-cita kita. Dan kita bisa meraih kesuksesan dan keberhasilan.
3. Seluruh dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmunya dengan tulus ikhlas. Dan Almamater Tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ardiansyah dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 25 Maret 1994, merupakan anak kelima dari lima bersaudara putra pasangan Bapak Asnawi A.F dan Ibu Nurhayati.

Penulis menyelesaikan pendidikan di:

1. SD Negeri 4 Kota Karang, Bandar Lampung diselesaikan tahun 2007.
2. SMP Negeri 3 Bandar Lampung, Bandar Lampung diselesaikan tahun 2010.
3. Kemudian melanjutkann di SMA Negeri 8 Bandar Lampung Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan lulus pada tahun 2013.
4. Tahun 2013, penulis diterima sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Falkutas Syari'ah dan Hukum pada Program Studi Siyasah (Hukum Tata Negara) melalui jalur Seleksi Penelusuran Minat Akademik (PMA).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul “Egaliter Hak Berpolitik antara Laki-laki dan Perempuan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Siyasah (Hukum Tata Negara), Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih seluruhnya kepada :

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN RadenIntan Lampung;
2. Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;
3. Drs. Haryanto H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;
4. Drs. H. Chaidir Nasution, M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;
5. Drs. Susiadi, M.Sos.I., selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;
6. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum., selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk penyelesaian skripsi ini;
7. Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan meluangkan waktu untuk penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum khususnya Program Studi Siyasah, atas ilmu dan didikan yang telah diberikan;

9. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.
10. Teman dekatku Aswan, Riswan, Deri, Agung, Fadhil, Taufik, Rahman, Agil, Ahmad yang selalu memberikan tawa dan canda setiap harinya.
11. Orang-orang yang mendukung Ustad Danu, Tessa, Ibu Yuni, Bapak Simon Sagala, Abi Izor, Mela, Riyanti Lestari, Keluarga Besar Futsal Cimeng 2013.
12. Keluarga Besar AMPIBI 2013.
13. Keluarga Besar Semen Merah Putih Warehouse Lampung.
14. Semua pihak yang membantu dan terlibat dalam perjalanan kehidupanku.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka dan ucapan terimakasih. Namun demikian, penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya. Aamiin.

Bandar Lampung, 1 september 2018
Penulis

Ardiansyah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul “Egaliter Hak Berpolitik antara Laki-laki dan Perempuan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Siyasah (Hukum Tata Negara), Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih seluruhnya kepada :

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN RadenIntan Lampung;
2. Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;
3. Drs. Haryanto H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;
4. Drs. H. Chaidir Nasution, M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;
5. Drs. Susiadi, M.Sos.I., selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;
6. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum., selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk penyelesaian skripsi ini;
7. Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan meluangkan waktu untuk penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum khususnya Program Studi Siyasah, atas ilmu dan didikan yang telah diberikan;

9. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.
10. Teman dekatku Aswan, Riswan, Deri, Agung, Fadhil, Taufik, Rahman, Agil, Ahmad yang selalu memberikan tawa dan canda setiap harinya.
11. Orang-orang yang mendukung Ustad Danu, Tessa, Ibu Yuni, Bapak Simon Sagala, Abi Izor, Mela, Riyanti Lestari, Keluarga Besar Futsal Cimeng 2013.
12. Keluarga Besar AMPIBI 2013.
13. Keluarga Besar Semen Merah Putih Warehouse Lampung.
14. Semua pihak yang membantu dan terlibat dalam perjalanan kehidupanku.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka dan ucapan terimakasih. Namun demikian, penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya. Aamiin.

Bandar Lampung, 1 september 2018
Penulis

Ardiansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	11

BAB II EGALITER HAK BERPOLITIK ANTARA LAK-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Egaliter Hak Berpolitik	
1. Pengertian Egaliter dan Hak-hak Politik	15
2. Dasar Hukum Hak-hak Politik Laki-laki dan Perempuan	22
B. Pendapat Para Ulama tentang Hak-hak Politik Laki-laki dan Perempuan	31
C. Tinjauan Hukum Islam tentang Egaliter Hak Berpolitik antara Laki-laki dan Perempuan di Indonesia	35

**BAB III PENERAPAN EGALITER HAK BERPOLITIK
ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI
INDONESIA**

- A. Penerapan Egaliter Hak Berpolitik di Indonesia...43
- B. Peranan Politik laki-laki dan perempuan di
Indonesia.....49
- C. Egaliter Hak Berpolitik antara Laki-laki dan
Perempuan di Indonesia.....55

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF TENTANG EGALITER HAK
BERPOLITIK ANTARA LAKI-LAKI DAN
PEREMPUAN DI INDONESIA**

- A. Bagaimana Egaliter Hak Berpolitik antara Laki-laki
dan Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum
Positif.....61
- B. Persamaan dan Perbedaan Egaliter Hak Berpolitik
antara Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum
Islam dan Hukum Positif.....69

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan75
- B. Saran76

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan skripsi ini lebih lanjut, lebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul skripsi dengan maksud untuk menghindari kesalahpahaman pengertian pembaca. Skripsi ini berjudul **“Egaliter Hak Berpolitik Antara Laki-laki dan Perempuan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”**. Adapun penjelasan judul tersebut adalah sebagai berikut :

Egaliter adalah sama, tidak ada perbedaan, jadi egaliter adalah persamaan derajat pada setiap manusia.¹

Hak-hak adalah sesuatu yang benar, kewenangan, kekuasaan, untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang/peraturan lain.²

Politik adalah ilmu yang membahas tentang ketatanegaraan atau kenegaraan yang meliputi sistem pemerintahan : segala sesuatu atau seluruh tindakan dan urusan kebijakan atau siyasat menyangkut masalah pemerintahan negara atau terhadap negara lain.³

Laki-laki dapat diartikan sebagai orang (manusia) yang mempunyai zakar, kalau dewasa mempunyai jakun dan adakalanya berkumis.⁴

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kantor Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 364.

²Drs sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, h. 154.

³Ibid, h. 367.

⁴Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer* (edisi Lengkap), Cetakan pertama, Gitamedia Press, Surabaya, 2006, h. 371.

Perempuan dapat diartikan sebagai orang (manusia) yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui.⁵

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk umat yang beragama Islam.⁶

Hukum positif adalah hukum yang berlaku pada saat ini di suatu negara, dalam hal ini adalah hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum positif yaitu hukum yang berlaku sekarang dalam suatu masyarakat tertentu bagi daerah tertentu.⁷

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa maksud judul skripsi ini adalah egaliter hak berpolitik antara laki-laki dan perempuan menurut hukum Islam dan hukum positif.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun beberapa alasan yang menyebabkan penulis tertarik dan memilih judul tersebut yaitu :

1. Alasan objektif
 - a. Kepemimpinan perempuan atau pemegang jabatan menjadi persoalan di kalangan ulama karena terdapat hadits yg melarang wanita untuk memimpin atau memegang jabatan dalam sebuah urusan

⁵B.N Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1983, h. 518.

⁶Ismail Muhammad syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara 1999), h.17

⁷Irwantoni, Buku Darras : *Ilmu Hukum Seri Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandar Lampung : Puskima Fakultas Ushuluddin, 2009), h.101

- b. Dalam sistem pemeritahan di Indonesia mengharuskan keikutsertaan perempuan minimal 30% dalam sebuah partai politik
 - c. Dari dua alasan tersebut terdapat kesenjangan yang menarik untuk di lakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam mengenai hak-hak berpolitik antara laki-laki dan perempuan dalam Islam dan hukum positif di Indonesia.
2. Alasan subjektif
- a. Pokok bahasan skripsi ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di fakultas syariah dan hukum jurusan siyasah
 - b. Literatur dan bahan-bahan atau data-data yang diperlukan dan menunjang sebagai refrensi kajian dalam usaha menyelesaikan skripsi ini.

C. Latar Belakang Masalah

Pertanyaan klasik tentang boleh tidak nya seorang wanita menjadi pemimpin (pemegang jabatan) sering penulis jumpai di kalangan masyarakat, salah satu yang menjadi topik pembicaraan di kalangan Islam adalah keterlibatan perempuan dalam politik.

Islam adalah agama yang universal yang mengajarkankeadilan bagi manusia tanpa pandang bulu. Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan tuntutan dari ajaran Islam yang wajib di laksanakan bagi setiap pemeluk nya, berbicara mengenai hak tentunya tidak lepas dari yang namanya kesetaraan atau egaliter yang tentu nya berkaitan dengan gender.

Istilah gender adalah suatu konsep kultural yang berkembang di masyarakat yang berupaya membuat

perbedaan peran, perilaku, mentalitas, dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan,⁸ ketimpangan ini terjadi karena adanya aturan, tradisi, dan hubungan timbal balik yang menentukan batas antara feminitas dan maskulinitas sehingga mengakibatkan adanya pembagian peran, dan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki.⁹

Terkait tentang gender Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا



Artinya :Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.(Q.S An-Nissa ayat 1).

⁸A.Ubaedillah & Abdul Rozak, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, Prenada Media Group, Jakarta, cetakan ke-8, 2012, h. 167

⁹*Ibid*, h. 167.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

. Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dari ayat Al-Qur'an di atas, jelas bahwa perempuan diciptakan oleh Allah (menurut asal muasal nya) dari satu jiwa yaitu Adam a.s. dari tulang rusuk sebelah kiri beliau lah diciptakan Hawa sebagai jodoh (isteri) Nabi Adam a.s, kemudian Adam dan Hawa beranak pinak secara berjodoh-jodoh, dan dari anak pinak Adam Hawa inilah berkembang biak anak cucunya yang semakin banyak dan tersebar ke seluruh pelosok dunia, berkelompok, berbangsa dan bergolong-golong agar saling mengenal.

Karena saling mengenal inilah terjadi pertautan kembali antara wanita dan pria di antara bangsa-bangsa itu di antara suku dan rumpun bangsa (ras) sehingga populasi nya (perkembangannya) semakin besar dan luas. Di dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya inilah akhirnya mereka semakin berpisah dari induk dan rasnya, dan terciptalah berbagai budaya dan peradaban di dunia ini sesuai dengan

alam sekitar mereka masing-masing yang ikut membentuk watak, adat,kebiasaan dan tingkat kesadaran mereka, Wanita itu tidak lain adalah bagian hidup dari pria yang tak terpisahkan, mereka akan selalu mendekat bertemu dan berpadu, karena kenyataannya mereka sama-sama seasal.

Terkait dengan politik, politik dapat diartikan antara lain sebagai urusan dan tindakan atau kebijakan mengenai pemerintahan negara atau negara lain.politik juga berarti kebijakan dan cara bertindakdalam menghadapi dan menangani suatu masalah,baik yang berkaitan dengan masyarakat maupun selainnya, Al-Qur'an berbicara tentang politik melalui sekian ayatnya, khususnya yang menggunakan kata hukum.¹⁰

Salah satu topik pembicaraan hangat di kalangan masyarakat Islam adalah keterlibatan perempuan dalam politik, yakni yang berkaitan dengan urusan negara dan masyarakat. Banyak dalih yang dikemukakan oleh para penentang hak perempuan, baik dengan penafsiran ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Maupun dengan menunjuk beberapa hal yang berkaitan dengan perempuan yang mereka nilai sebagai kelemahan yang menghalangi mereka menyang hak tersebut. Misalnya, marujuk pada ayat:

¹⁰ M. Quraish Shihab,*perempuan dari cinta sampai seks,dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah dari bias lama sampai bias baru*,Tangerang, Lentera Hati, 2014, h. 377.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِيتٌ
حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ ۚ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْزُبُوهُنَّ ۚ فَإِن
أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا ﴿٧١﴾

Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Di dalam Al-Qur'an ditemukan dalil yang dapatdi jadikan dasar untuk mendukung hak-hak perempuan dalam bidang politik. Salah satu ayat yang dapat dikemukakan dalam kaitan ini adalah QS. At-tauba ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
 بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
 وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ
 سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦١﴾

Artinya :dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) aulia menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Pengertian ‘aulia’ di sini, mencakup kerja sama, bantuan, dan penguasaan, sedangkan pengertian menyuruh yang makruf mencakup segala segi kebaikan/perbaikan, kehidupan, termasuk memberi nasihat/kritik kepada penguasa. Dengan demikian, setiap lelaki dan perempuan hendak nya mampu mengikuti perkembangan masyarakatnya agar masing-masing mampu melihat dan member saran/nasihat dan kritik dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk kehidupan politik.

Sementara ulama hingga masa kini, walaupun dapat menerima keterlibatan perempuan dalam politik praktis,

masih berkeras menolak memperkenankan perempuan menjadi kepala negara.

Dalih mereka yang terkuat adalah sabda Nabi SAW.:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ
مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بَنَاتُ كِسْرَى قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ».

“Diriwayatkan dari Abu Bakrah, katanya: Tatkala sampai berita kepada Rasulullah bahwa orang-orang Persia mengangkat raja puteri Kaisar, Beliau bersabda: Tidak akan pernah beruntung keadaan suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya pada seorang perempuan.” (HR. Ahmad, Bukhari, Turmudzi dan An-Nasa’I melalui abu bakar)

Sedangkan hukum positif di Indonesia mengharuskan keikutsertaan wanita minimal 30% dalam partai politik di Indonesia yang tertuang dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD menyebutkan daftar bakal calon yang disusun partai politik memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan, bahkan Pasal 56 ayat 2 menyebutkan bahwa dalam setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan. Poin-poin tersebut dikuatkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 7 Tahun 2013 pada Pasal 11b, 11d, 24 ayat 1c-d dan ayat 2.

Dari teori di atas terdapat kesenjangan antara hukum Islam dan hukum positif yang menarik perhatian penulis untuk diteliti secara lebih lanjut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, agar diperoleh pembahasan yang konsisten mengenai obyek material yang dikaji, maka masalah yang menjadi perhatian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana egaliter hak berpolitik antara laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam dan hukum hopsitif ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan egaliter hak berpolitik antara laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam dan hukum positif ?

E. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian atau riset pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengkajidan mengembangkan ilmu pengetahuan, demikian pula halnya dengan penelitian yang akan diungkapkan dalam skripsi ini mempunyai tujuan tertentu.

Adapun yang menjadi tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk menggambarkan secara utuh dan jelas Islam mengatur tentang hak bepolitik antara laki-laki dan perempuan
2. Untuk mengetahui perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai hak berpolitik antara laki-laki dan perempuan

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat akademisi dalam rangka menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode penelitian

Dalam suatu penelitian, mutlak diperlukan suatu metode yang untuk mendapatkan data yang akurat, sehingga dapat diuji kebenarannya, dan untuk mempermudah mendapatkan data yang berkenaan dengan masalah yang sedang dibahas, sehingga penelitian berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Metode dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat esensial, sebab dengan adanya metode akan dapat memperlancar penelitian. Dalam penelitian, penulis menggunakan metode :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*libelary research*). Penelitian kepustakaan adalah “suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data di lapangan dan mempelajarinya”.¹¹

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan suatu obyek atau subyek penelitian, pada saat sekarang berdasarkan faktor-faktor yang tampak atau sebagaimana adanya.¹²

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer (pokok) dan data sekunder (tambahan).

¹¹Ahmadi Muhammad Munawar, *Prinsip-prinsip Metodologi Research*, Sumbangsih, Yogyakarta, 1975, h. 2.

¹²Suprpto, *Metode Riset dan Aplikasinya dalam Pemasaran*, Fakultas Ekonomi, Jakarta, 1981, h. 11.

- a. Data Primer, yaitu :
Data yang langsung dapat diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus. Dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan judul di atas.
 - b. Data Sekunder, yaitu :
data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dari berbagai sumber yang ditulis tokoh politik yang lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam skripsi ini. Yakni dari buku-buku, majalah, dan Koran.
3. Pengumpulan Data, yaitu :
Untuk pengumpulan data ini penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu: mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, manaskrib, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda dan lain-lainnya.¹³
4. Metode Pengelolaan Data
Secara umum pengelolaan data setelah data terkumpul dapat dilakukan:
- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis. Dan memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
 - b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik itu

¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi II, Renika Cipta, Jakarta, 1993, h. 107.

sumber dari Al-Qur'an dan hadis, atau buku-buku literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

- c. *Rekontruksi* data yaitu menyusun ulang secara terartur berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian¹⁴.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis, langkah yang digunakan adalah memeriksa data-data yang telah terkumpul secara konsepsional atas makna yang terkandung secara intensif. Analisis data ini merupakan pemikiran yang merinci masalah data, fakta dan sumber-sumber data secara kritis. Untuk menyajikan data dalam bentuk uraian skripsi penulis menggunakan analisis kualitatif dan komparatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati¹⁵, dan membandingkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain nya. Serta menggunakan analisis kualitatif ialah: dengan cara memahami dari buku-buku yang berkaitan, dalam hal egalaliter hak politik laki-laki dan perempuan menurut hukum Islam hukum positif di Indonesia.

¹⁴Amiruddin Dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), h. 107.

¹⁵Lexy J. moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remadja Rosda Karya 1991),

BAB II

EGALITER HAK BERPOLITIK ANTARA LAK-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Egaliter Hak Berpolitik

1. Pengertian Egaliter dan Hak-hak Politik

Menurut Bahasa, Egaliter berasal dari bahasa Perancis : Egal, egalite atau egalitaire, yang berarti sama, tidak ada perbedaan, memiliki persamaan hak antara manusia diserap ke bahasa Indonesia menjasi egaliter, yang artinya sama sederajat Menurut istilah arti egaliter adalah manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah, dan yang menjadikan tinggi rendahnya derajat seseorang bukan karena kekayaan atau kedudukan, keturunan, suku, ras, golongan, dan sebagainya, melainkan karena Prestasi amal masing-masing.¹⁶

Islam adalah agama yang universal yang mengajarkan keadilan bagi manusia tanpa pandang bulu. Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan tuntutan dari ajaran Islam yang wajib di laksanakan bagi setiap pemeluk nya, berbicara mengenai hak tentunya tidak lepas dari yang namanya kesetaraan atau egaliter yang tentunya berkaitan dengan gender.

Istilah gender adalah suatu konsep kultural yang berkembang di masyarakat yang berupaya membuat perbedaan peran, perilaku, mentalitas, dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan,¹⁷ ketimpangan ini terjadi karena adanya aturan ,tradisi, dan hubungan timbal balik yang menentukan

¹⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Kantor Balai Pustaka, Jakarta, 1989), h. 285.

¹⁷A.Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, Op.Cit.* h. 167.

batas antara feminitas dan maskulinitas sehingga mengakibatkan adanya pembagian peran, dan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki.¹⁸

Berkenaan dengan egalitarianitas dalam Islam, surat al-Hujurat 49 Ayat 13

menegaskan bahwa orang yang paling mulia di hadapan Allah SWT adalah orang yang paling bertaqwa, bukan orang yang paling kaya, paling pandai atau paling berkuasa, entah itu laki-laki atau perempuan dan entah berasal dari suku bangsa apapun, hal ini telah disebutkan di permulaan ayat bahwa manusia itu tercipta dari asal muasal yang sama, yaitu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kemudian tersebar ke berbagai kelompok dan suku bangsa. Ditegaskan pula bahwa antar sesama manusia perlu mengadakan komunikasi dan interaksi timbal balik. Ayat tersebut diceritakan turun berkenaan dengan beberapa peristiwa, antara lain peristiwa yang terjadi pada waktu *fath al-makkah*. Dijelaskan bahwa Bilal bin Rabah mengumandangkan seruan adzan dan dinilai oleh al-Harith bin Hisyam tidak pantas karena Bilal adalah seorang "bekas" budak yang berkulit hitam. Suhayl bin Amr merespon penilaian tersebut dengan menyatakan bahwa jika perbuatan Bilal itu salah, tentu Allah SWT akan mengubahnya dan turunlah ayat tersebut.¹⁹

¹⁸ *Ibid*, h. 167.

¹⁹ Abu al-Hasan 'Ali bin Ahmad al-Wahidi, *Asbab al-Nuzul*, Abu al-Qasim Hibatullah bin Salamah Abu Nashr (pentahqiq), (Kairo: Maktabah al-Dakwah, t.t.), h. 295

Jika kemudian ada aturan-aturan dalam hukum Islam yang kelihatannya tidak sesuai dengan prinsip egaliter dan prinsip-prinsip lainnya, maka aturan tersebut harus dipahami sesuai dengan konteks realitas sosial yang melingkupinya dan memperhatikan fungsinya sebagai *legal counter* terhadap aturan-aturan hukum non-egaliter yang berlaku pada masa Jahiliyyah. Sebagai contoh hukum waris yang membagi harta warisan pada laki-laki dan perempuan dengan bagian satu berbanding dua sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur'an, menurut pemahaman yang egaliter, sebagaimana diungkapkan oleh Masdar misalnya, harus dipahami dengan memperhatikan dua hal yang penting. *Pertama*, dengan memberi bagian warisan kepada perempuan serta mendudukan laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai subyek penerima warisan, maka berarti hukum Islam telah melakukan reformasi yang cukup revolusioner dan radikal terhadap hukum Jahiliyyah yang telah ada sebelumnya, yaitu tidak menjadikan perempuan sebagai subyek penerima harta warisan dan bahkan bisa menjadi hart warisan itu sendiri. *Kedua*, setting sosial ekonomi dalam kehidupan keluarga pada masa munculnya aturan hukum tersebut adalah beban nafkah keluarga ditanggung oleh laki-laki, sehingga pembagian warisan yang membagi laki-laki dengan bagian warisan yang lebih besar daripada bagian warisan perempuan merupakan pembagian yang adil.²⁰ Dengan begitu, maka aturan-aturan hukum Islam adalah aturan hukum yang memiliki karakter egaliter, tidak rasial, tidak feodal dan tidak partial

²⁰ Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, cet. II (Bandung: Mizan, 1997), h. 52-53.

Hak berasal dari bahasa Arab *al-haqq*, yang berarti menetapkan, menguatkan.²¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu²² sedangkan menurut Kamus Politik adalah sesuatu yang benar, kepunyaan milik, kewenangan, kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lain, kekuasaan yang benar untuk menuntut sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu.²³ Secara terminologis ada beberapa hak yang dikemukakan oleh para ulama fiqh Wahbah Zuhaili mendefinisikan kata hak dengan sesuatu hukum yang ditetapkan secara syara. Menurut Maulana Abu A'la Maududi hak diartikan sebagai ketetapan, kewajiban, yakin, yang patut dan benar.²⁴ Hak dapat juga disebut hak asasi yaitu sesuatu bentuk yang dimiliki oleh seseorang karena kelahirannya. Bukan karena diberikan oleh masyarakat atau Negara. Sedangkan Menurut Azhar Basyir, hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat, atau pada keduanya, yang diakui oleh syara.

Politik dalam Bahasa Arabnya disebut *Siyasah* yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan dan pembuatan kebijaksanaan.²⁵ Kemudian diterjemahkan menjadi siasat, atau

²¹ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), h. 282

²² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2011), h. 474

²³ Drs. Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2007), h. 367

²⁴ Maulana Abu A'la, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) h. 14

²⁵ Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 3.

dalam Bahasa Inggrisnya disebut *Politics*. Dalam kamus bahasa Belanda yang ditulis oleh Vandertas, kata *politiek* mengandung arti *beleid*. Kata *beleid* sendiri dalam bahasa Indonesia berarti kebijakan (*policy*). Kebijakan sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti rangkaian, konsep dan asas yang menjadi garis besar dandasar rencana dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak.²⁶ Asal mula kata politik berasal dari bahasa Yunani “*Polis*” yang berarti negara kota.²⁷ Politik adalah suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, politik dapat dikatakan ilmu karena merupakan pengetahuan yang memiliki objek, subjek, metodologi, sistem terminologi, ciri, teori yang khas dan spesifik serta di terima secara universal diseluruh dunia.²⁸

Menurut M. Quraish Shihab, politik diartikan sebagai urusan dan tindakan atau kebijakan mengenai pemerintahan negara atau negara lain. Politik juga berarti kebijakan dan cara bertindak dalam menghadapi dan menangani satu masalah, baik yang berkaitan dengan masyarakat maupun lainnya.²⁹ Sedangkan menurut Ramlan Surbakti, politik acapkali didefinisikan dengan keputusan pemerintah yang bersifat otoritatif karena kewenangan paksaan dimonopoli oleh pemerintah.³⁰ Berbeda dengan pengertian tersebut, dalam

²⁶Frenki, M.Si, *Politik Hukum Islam*(LP2M IAIN RADEN INTAN, 2015), h.6.

²⁷A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia* (Jakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 6.

²⁸Dr. H. Inu Kencana Syafie, M.Si, *Ilmu Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 10.

²⁹M. Quraish Shihab, M. Quraish Shihab, *Perempuan*(Tangerang: Lentera Hati, 2014), h. 377.

³⁰Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*(Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999), h. 205.

perspektif Deliar Noer, politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat.³¹ Menurut T. May Rudy, secara garis besar, politik adalah berkenaan dengan kekuasaan, pengaruh, kewenangan pengaturan, dan ketaatan atau ketertiban.³² Hal ini menunjukkan bahwa hakikat politik adalah perilaku manusia, baik berupa aktivitas ataupun sikap, yang bertujuan mempengaruhi ataupun mempertahankan tatanan sebuah masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Ini berarti bahwa kekuasaan bukanlah hakikat politik, meskipun harus diakui bahwa ia tidak dapat dipisahkan dari politik, justru politik memerlukannya agar sebuah kebijaksanaan dapat berjalan dalam kehidupan masyarakat.

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ
 أَوْ أَنْتُمْ^ط بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ^ط فَأَلَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ
 دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَتُلُوا وَقُتِلُوا لَا تُكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
 وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّتِ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا^ط الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ^ط
 وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٥﴾

³¹Deliar Noer, *Pengantar Ke Pemikiran Politik* (Jakarta: CV Rajawali, 1983), h. 6.

³²T. May Rudy, *Pengantar Ilmu Politik: Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya* (Bandung: Refika Aditama, 2003), h. 9.

Artinya : Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.(Qs. Ali-Imran 195).

Dari ayat di atas, bahwa Allah tidak menyia-nyiakan amal seseorang yang taat dan tidak akan membedakan antara pria dan wanita dalam memberi pahala dan balasan, karena kedua jenis ini satu sama lain turun menurunkan, wanita berasal dari pria dan begitu juga sebaliknya.

Islam tidak membedakan eksistensi antara laki-laki dan perempuan dalam kapasitasnya sebagai hamba Allah, khalifah, dan perjanjian primordial dengan Allah. Di samping itu, Islam juga tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan kerja dan meraih prestasi yang setinggi-tingginya pada bidang-bidang yang dibenarkan Islam, melainkan semua manusia diberikan kesempatan dan hak yang sama sehingga antara laki-laki dan perempuan berkompetisi secara sehat, tanpa mengabaikan kodrat mereka masing-masing.³³

Adapun yang dimaksud hak-hak politik adalah hak-hak yang ditetapkan dan diakui undang-undang atau konstitusi berdasarkan keanggotaan sebagai warga negara. Hak-hak politik tersebut berlaku bagi warga negara setempat dan tidak berlaku bagi warga asing. Dalam hak-hak politik terhimpun konsep hak dan kewajiban sekaligus. Hak-hak politik pada tingkat tertentu menjadi kewajiban bagi individu karena hak-hak itu menjadi wajib bagi mereka. Hak-hak politik mengisyaratkan partisipasi individu dalam pembentukan

³³Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*(Jakarta: Restu Ilahi, 2005), h.77.

pendapat umum, baik dalam pemilihan wakil-wakil mereka di lembaga perwakilan rakyat atau pencalonan diri mereka untuk menjadi anggota lembaga perwakilan tersebut.

Hak-hak politik tersebut antara lain mencakup: 1) Hak untuk mengungkapkan pendapat dalam pemilihan dan referendum; 2) Hak untuk mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat; 3) Hak pencalonan menjadi presiden dan hal-hal lain yang berkaitan dengan politik. Hak-hak politik perempuan sampai detik ini masih merupakan masalah krusial. Dengan demikian jelas bahwa hak politik adalah hak bagi setiap individu untuk berpartisipasi dengan menjadi ahli badan politik dalam negara seperti contoh melibatkan diri dalam partai-partai politik, hak memilih dalam pemilu, hak menjadi wakil dalam DPR, dan sebagainya lagi hak-hak yang terkait dengan urusan-urusan negara dan pemerintahan.

2. Dasar Hukum Hak-hak Politik Laki dan Perempuan

Agama Islam, adalah agama yang diturunkan Allah swt untuk hambanya dengan perantara nabi Muhammad saw yang lengkap berisi petunjuk dan pelajaran untuk pegangan hidup agar berbahagia dunia akhirat.³⁴ Islam datang dengan tugas-tugas syariat yang dibebankan kepada pria dan wanita; dan ia menegatengahkan hukum-hukumnya yang menangani berbagai tindakan dan tugas masing-masing mereka (pria dan wanita).

Jadi kedatangannya tidak memandang persamaan hak atau keutamaan antara wanita dan pria, terlepas dari apakah itu masalah wanita atau pria saja. Untuk itu masalah emansipasi

³⁴Abdurrahman Al Baghdadi, *Emansipasi Adakah Dalam Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1994), h. 16

wanita terhadap pria bukan merupakan suatu permasalahan atau sasaran yang perlu diperhitungkan di dalam Islam. Sebab keberadaan wanita itu sederajat dengan pria atau wanita itu setara dengan pria.

Dalam wacana hubungan Islam dan kesetaraan gender, Islam memandang perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti laki-laki. Kualitas manusia dalam Islam terletak pada prestasi seseorang tanpa mengenal perbedaan jenis kelamin.³⁵ Islam menegaskan aturan-aturan kehidupan laki-laki dan wanita berdasarkan kenyataan yang dapat menjamin keterpaduan serta kemajuan golongan dan masyarakat selain memberikan kebahagiaan yang hakiki kepada wanita dan pria sesuai dengan kemuliaan martabat manusia yang dianugerahkan Allah swt.³⁶

Dalam Islam diajarkan adanya persamaan antarmanusia, baik antar pria dan wanita, maupun antarbangsa, suku, dan keturunan. Dalam pandangan manusia, perbedaan yang meninggikan atau merendahkan seseorang sesungguhnya hanya nilai pengabdian dan ketakwaan-nya kepada Allah SWT. Kejadian manusia berpasangan antara pria dan wanita merupakan bukti nyata adanya rahmat Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya:

³⁵ A. Ubaedillah, Abdul Rozak, *Pancasila Demokrasi...*, *Op.Cit.* h. 168

³⁶ Abdurrahman Al Baghdadi, *Emansipasi Adakah Dalam Islam...*, *Op.Cit.* h. 18

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُوتُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٣﴾

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Masalah kepemimpinan perempuan disebutkan dalam al – Qur'an dan Hadits, Q.S Al-Hujurat (49) 13 :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

خَيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dijelaskan bahwa manusia diciptakan-Nya berbagai-bagai bangsa dan suku-suku bangsa, berbeda-beda ras dan warna kulit bukan untuk saling mencemooh dan merusak satu sama lain, tetapi agar saling mengenal dan saling menolong. Allah tidak menyukai orang-orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunannya, kepangkatan atau kekayaannya, karena dalam pandangan Islam, kemuliaan manusia tidak diukur dengan keturunan atau kekayaannya, melainkan yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang yang paling bertakwa kepada-Nya.

Dengan tegas Islam mengajarkan dalam Al-Qur'an, menolak pandangan-pandangan masyarakat yang membedakan lelaki dengan perempuan dengan menyatakan keduanya berasal dari satu jenis yang sama dan dari keduanya secara bersama-sama mengembangkan keturunannya, baik yang pria maupun wanita. Allah menjelaskan bahwa Dia memuliakan anak adam dengan raut mukayang indah, diberi akal dan potongan tubuh yang serasi agar dapat menerima petunjuk sehingga mampu berfikir rasional dan objektif dalam memahami makna hidup dan mencari kebutuhan hidupnya. Demikian pula kemampuan mengelola kekayaan alam serta menciptakan berbagai peralatan.

Sebagai rujukan prinsip dasar masyarakat Islam, Al-Qur'an menunjukkan bahwa pada dasarnya kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama. Keduanya diciptakan dari satu *nafs* (*living entity*), di mana yang satu tidak memiliki keunggulan terhadap yang lain. Atas dasar itu, prinsip Al-Qur'an terhadap hak kaum laki-laki dan perempuan adalah sama, di mana hak istri adalah diakui secara adil (*equal*) dengan hak suami. Dengan kata lain, laki-laki memiliki hak

dan kewajiban atas perempuan, dan kaum perempuan juga memiliki hak dan kewajiban terhadap kaum laki-laki. Itulah mengapa Al-Qur'an dianggap memiliki pandangan yang revolusioner terhadap hubungan kemanusiaan, yakni memberikan keadilan hak antara laki-laki dan perempuan. Terlebih jika dikaitkan dengan konteks masyarakat pra-Islam yang ditransformasikannya.³⁷ Ajaran Al-Qur'an tentang perempuan umumnya merupakan bagian dari usaha Al-Qur'an untuk menguatkan dan memperbaiki posisi sebagian atau kelompok lemah dalam kehidupan masyarakat Arab pra-Islam. Apa yang menjadi tujuan pokok Al-Qur'an tentang perempuan adalah menghilangkan bagian-bagian yang memperlakukan perempuan secara kejam.

Jika diteliti dalam Al-Qur'an, ada beberapa ayat yang dapat dijadikan dalil bahwa perempuan memiliki peluang yang sama dengan laki-laki untuk berperan dalam wilayah publik, sebagaimana halnya mereka berperan dalam wilayah domestik.³⁸ Hak politik dapat diartikan sebagai hak warga negara untuk ikut berperan aktif dan berpartisipasi langsung di dalam mengatur urusan pemerintahan, seperti menjabat sebagai kepala negara atau menteri, maupun tidak langsung seperti berkecimpung di lembaga-lembaga legislatif atau dewan lainnya. Tetapi pengertian secara umum ialah bahwa hak politik berarti hak memilih dan dipilih, serta hak

³⁷ Mansour Fakih, "Posisi Kaum Perempuan dalam Islam", dalam Mansour Fakih, dkk., *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), h. 50-51.

³⁸ Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Labad Press, 2006), h. 173.

menjalankan tugas-tugas umum tanpa ada perbedaan jenis kelamin.³⁹

Kehidupan seorang muslim tidak bisa dipisahkan dari persoalan berpolitik karena politik merupakan sarana efektif untuk merealisasikan kesempurnaan Islam. Setiap muslim yang mengaku beribadah kepada Allah SWT mempunyai hak untuk berpolitik, bahkan seorang muslim berkewajiban untuk mengaplikasikan politik secara Islami guna merealisasikan Islam secara kaffah. Berdasarkan atas mafhum istikhlaf inilah dasar diwajibkannya politik bagi umat Islam. Menurut Islam, perempuan mempunyai hak dalam berpolitik. Laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar melalui beberapa cara –yang termasuk diantaranya dengan media politik. Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam hak-hak individu dan hak-hak kemasyarakatan. Namun demikian, bahwa semua hak tersebut harus diletakkan dalam batas-batas kodrati perempuan.

Dalil tentang legalitas perempuan untuk berpolitik terdapat di dalam Al-Qur'an, Sunah dan siroh yang di dalamnya tidak ada syubhat dan jidal. Allah SWT berfirman: "Orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rosul-Nya.

Salah satu ayat yang seringkali dikemukakan oleh para pemikir Islam dalam kaitan hak-hak politik perempuan yaitu :

³⁹Muhammad Ali Quthub, *Bai'at Kaum Wanita Terhadap Rasulullah* (Surabaya: Bina Ilmu 1984) h. 90.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
 بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
 وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ
 اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya : dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Qs. At-Taubah 71).

Secara umum ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antara lelaki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Dengan demikian, setiap lelaki muslim dan perempuan muslimah hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu melihat dan memberikan saran (nasihat) dalam berbagai bidang kehidupan.⁴⁰

Ayat ini menunjukkan bahwa

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. Ke-13 (Bandung: Mizan, 1996), h. 273.

perempuan seperti laki-laki. Masing- masing mereka boleh berpartisipasi dalam politik dan mengatur urusan masyarakat, dan mempunyai hak dalam mengatur kepentingan umum. Hak- hak politik ini mencakup :

- 1) Hak dalam mengungkapkan pendapat dalam pemilihan dan referendum dengan berbagai cara.
- 2) Hak dalam pencalonan menjadi anggota lembaga perwakilan dan anggota setempat.
- 3) Hak dalam pencalonan menjadi presiden dan hal-hal lain yang mengandung persekutuan dan penyampaian pendapat yang berkaitan dengan politik.⁴¹

Dalam ayat itu dijelaskan pula bahwa baik laki-laki maupun perempuan dibebani tugas-tugas ibadah dan hukum-hukum agama tanpa ada perbedaan. Sholat, zakat, puasa, dan haji ketika mampu, merupakan kewajiban agama bagi laki-laki maupun perempuan. Selain itu perempuan seperti laki-laki dibebani kewajiban menegakkan amar ma'ruf nahiyy munkar dan pengajaran akhlak.⁴²

Islam telah memberikan persamaan kepada laki-laki dan perempuan yang pada perkembangan zaman perempuan tanpa sadar dituntut untuk lebih berkiprah khususnya dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat. Dalam Islam telah dijelaskan bahwa perempuan boleh dan berhak berkecimpung dalam bidang politik yang merupakan area public

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa laki-laki beriman dengan perempuan-perempuan beriman adalah yang sebagai jadi pemimpin bagi yang lain, artinya perempuan ambil bagian

⁴¹ AQosimJa'far, *Perempuan Dan Kekuasaan: Menelusuri Hak Politik Dan Persoalan Gender Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2008), h. 25.

⁴² *Ibid*, h. 27

yang penting di dalam menegakkan agama, bukan laki-laki saja.⁴³ Di sini kegiatan politik perempuan sama halnya dengan menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Di sisi lain, ayat Al-Qur'an yang juga dijadikan dasar oleh banyak ulama untuk membuktikan adanya hak berpolitik bagi setiap lelaki dan perempuan adalah Surah asy-Syura [42] ayat 38 :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ
بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya : dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

Di dalam ayat ini terkandung salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan secara bersama, termasuk kehidupan politik, yaitu dengan *syuura* (musyawarah). Artinya, setiap warga masyarakat dalam kehidupan bersamanya dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah. Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa setiap lelaki ataupun perempuan memiliki hak tersebut, karena tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami melarang keterlibatan perempuan dalam bidang kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam bidang politik. Bahkan sebaliknya, sejarah Islam menunjukkan betapa kaum perempuan terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan tanpa kecuali.⁴⁴

⁴³Hamka, *Tafsir Al-Azhar juz IX-X*, (Jakarta: Panjimas, 2005), 276.

⁴⁴*Ibid.* h. 274-275.

B. Pendapat Para Ulama tentang Hak-hak Politik Laki-laki dan Perempuan

Masih terdapat silang pendapat di kalangan ahli hukum Islam tentang peran sosial politik kaum wanita, bolehkah wanita menjadi pemimpin. Sementara pro-kontra tetap ada. Sejak berabad lamanya masyarakat memandang perempuan dan dari laki-laki dan karenanya harus tunduk kepada kekuasaan mereka. Walaupun begitu, sebagian di antaranya sikap-sikap tersebut sangat meluas, sehingga norma-norma kitab suci yang progresif pun menjadi terpengaruh dan sebagai akibatnya, perlu diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga merefleksikan sikap mental yang berlaku. Perbincangan mengenai hak-hak politik perempuan dalam wacana Islam melahirkan dua aliran besar : pertama, aliran yang mengklaim bahwa Islam tidak mengakui hak-hak politik bagi perempuan. Kedua, aliran yang berpendapat bahwa Islam tidak menghalangi perempuan untuk mendapatkan hak-hak politiknya, sekalipun ada segolongan dari golongan-golongan yang berpendapat demikian, yang menyatakan bahwa masyarakat kita belum memiliki kesiapan jika perempuan di masa sekarang menggunakan hak-hak politik itu.

Menurut pandangan Islam pria dan wanita adalah sama, karena mereka merupakan sekelompok umat manusia yang satu. Atas dasar itu maka dikeluarkanlah pertanggungjawaban syara' serta dipersamakan hak-hak dan kewajiban atas mereka. Islam adalah agama yang sangat

peduli dengan penegakkan HAM yang bertalian dengan keadilan gender.⁴⁵

Tatkala hak dan kewajiban itu bersifat manusiawi (insaniyah), yaitu ketika pertanggung-jawaban itu berhubungan dengan manusia. Maka di saat itu dijumpai persamaan hak dan kewajiban, persamaan di dalam memikul tanggung jawab, masing-masing pria dan wanita memiliki hak-hak yang sama serta menanggung kewajiban yang sama pula, tidak berbeda dan tidak pula bertentangan, sehingga mereka sama-sama sepenanggungan. Bertolak dari hal ini Islam tidak membedakan antara pria dan wanita di dalam mengajak manusia kepada keimanan.

Para ulama tidak pernah ragu-ragu untuk mengambil riwayat dari perawi wanita sebagaimana mereka mengambil dari perawi pria. Karimah Al Marzawiyah dan Syayidatul wuzara, misalkan, keduanya ialah termasuk perawi Hadist terkemuka yang hadits-haditsnya pernah mengatakan bahwa jumlah guru-gurunya dari kaum wanita lebih dari delapan puluh orang.⁴⁶

Menurut Al-Maududi, sesungguhnya al-Qur'an tidak membatasi kepemimpinan laki-laki atas perempuan di dalam rumah, dan memimpin sebuah negara lebih berbahaya dan lebih besar tanggung jawabnya dibandingkan memimpin sebuah rumah. Dengandemikian, tertolaklah pendapat yang mengatakan bahwa ketentuan hukum dalam ayat itu berhubungan dengan kehidupan berumah tangga, tidak dengan politik sebuah negara.

⁴⁵A. Ubaedillah, Abdul Rozak, *Pancasila Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 172.

⁴⁶Abdurrahman Al Baghdadi, *Emansipasi Adakah Dalam Islam...*, *Op.Cit.*h.38

Fatwa Universitas Al-Azhar menyatakan bahwa syariat Islam menyamakan antara perempuan dan laki-laki dalam hal-hal yang berhubungan dengan wewenang khusus dan bertindak dalam ruang lingkup urusan khususnya. Syariat Islam tidak mengakui perempuan menjadi anggota parlemen sebab keanggotaan parlemen itu termasuk wewenang umum. Menurut argumen nya bahwa bentuk penciptaan fisik dan nalurinya, perempuan diciptakan untuk mengemban tugas keibuan, mengasuh generasi penerus dan mendidiknya.⁴⁷

Ibnu Abidin berkata: "Menetapkan perempuan dalam tugas kepemimpinan, tidak diragukan lagi ketidaksahannya, karena perempuan tidak memiliki kemampuan untuk memikul tugas itu." Adapun yang dimaksudkan dengan kemampuan itu adalah kemampuan memimpin.⁴⁸

Imam al-Ghozali menyatakan bahwa seorang perempuan tidak bisa didudukkan sebagai imam (kepala negara). Menurut nya bagaimana bisa seorang perempuan melaksanakan pemerintahan sedangkan dia sendiri tidak memiliki hak untuk memutuskan perkara besar dan tidak mampu memberi kesaksian dalam berbagai persoalan keputusan hukum.⁴⁹

Ibnu Hazm, ia memfatwakan bahwa perempuan dipandang oleh syariat dapat melakukan berbagai pekerjaan umum (yakni pekerjaan apa saja) tanpa kecuali, jika memang ia perempuan yang baik, mampu, dan mempunyai keahlian untuk melakukan pekerjaan yang menjadi tugasnya. Kecuali,

⁴⁷Yusuf Al-Qardhawy, *Fiqh Daulah dalam Persepektif Al-Qur'an dan Sunnah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h.239.

⁴⁸Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Amzah, 2005), h.128.

⁴⁹*Ibid.* h. 132.

kekhalifahan atau keimaman karena khalifah harus seorang lelaki. Tugas pekerjaan lain yang bukan kekhalifahan pekerjaan mengurus kemaslahatan kaum muslim berhak menanganinya.⁵⁰

Ulama ternama Yusuf Al-Qordhawi menjelaskan bahwa penafsiran terhadap surat an-nisa ayat 34 bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita dalam lingkup keluarga atau rumah tangga. Jika ditinjau tafsir surat An-Nisa ayat 34 bahwa laki-laki adalah pemimpin wanita, bertindak sebagai orang dewasa terhadapnya, yang menguasainya, dan pendidiknya tatkala dia melakukan penyimpangan. “Karena Allah telah mengunggulkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Yakni, karena kaum laki-laki itu lebih unggul dan lebih baik daripada wanita. Oleh karena itu kenabian hanya diberikan kepada kaum laki-laki.”⁵¹

Menurut Farid Abdul Khaliq adalah bahwa Islam tidak mengharamkan perempuan untuk mengambil dan melakukan hak-hak politik ini, juga tidak menutupi persamaannya dengan laki-laki dalam hak dan kewajiban. Islam juga tidak menghalangi aktivitas berpolitiknya atau menghalanginya untuk ikut serta dalam anggota majelis permusyawaratan dalam mengusulkan undang-undang atau pengawasan atas para pejabat, dimulai dari kewajiban menasihati, selanjutnya meminta pertanggungjawaban secara berangsur-angsur dan terakhir sebagai hak atau wewenang majelis permusyawaratan; memberhentikan penguasa atau menghancurkan pemerintahannya. Islam juga tidak melarang

⁵⁰Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih* (Jakarta : Pustaka Hidayah, 1999), h. 675.

⁵¹Ahmad,,“PemimpinPerempuan” (On-Line),tersediadi:<http://kepemimpinan-fisipuh.blogspot.com>, (10/03/2018)

perempuan menduduki jabatan kementerian atau jabatan yang lebih tinggi lagi. Tidak ada nash yang jelas dan pasti dalam Al-Qur'an dan sunnah yang melarang hal demikian.⁵²

C. Tinjauan Hukum Islam tentang Egaliter Hak Berpolitik antara Laki-laki dan Perempuan di Indonesia

Hukum Islam memungkinkan timbulnya banyak tafsiran, sepihak dan subjektif. Secara horizontal tidak ada kekuatan yang mampu menekan kebebasan individu lain, baik itu negara, pemilik modal, atau kekuatan individu.. Semuanya memiliki nilai dan perlakuan yang sama dihadapan Allah Swt. Hanya satu yang menjadi pembeda, yaitu kadar ketakwaan kepada Allah Swt. Oleh karena itu, Islam sebenarnya menjadi sarana yang tepat untuk mempersatukan visi dan misi kesetaraan laki-laki dan perempuan.

Pada dasarnya ahlul halli wal aqdi adalah orang-orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wakil-wakilnya karena ikhlas, konsekuen, takwa, adil dan kejernihan pikiran serta kegigihan mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya.

Seorang muslim sudah selayaknya menjadikan Islam sebagai cara pandangnya dalam memandang, menghadapi dan menyelesaikan segala persoalan. Islam telah memberikan persamaan kepada laki-laki maupun perempuan yang pada perkembangan zaman perempuan tanpa sadar dituntut untuk lebih berkiprah khususnya dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat.

⁵²Farid Abdul Khaliq, *Op.Cit*, h.148.

Perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam menggapai hak untuk menduduki jabatan politik. Jabatan politik perempuan merupakan seorang perempuan yang mempunyai kedudukan dalam suatu organisasi dalam politik. Seorang yang memiliki jabatan dalam politik sudah pasti akan memelihara, mengurus, mengembangkan jalannya roda pemerintahan seperti tugas khalifah.

Jadi kedatangannya tidak memandang persamaan hak atau keutamaan antara wanita dan pria, terlepas dari apakah itu masalah wanita atau pria saja. Untuk itu masalah emansipasi wanita terhadap pria bukan merupakan suatu permasalahan atau sasaran yang perlu diperhitungkan di dalam Islam. Sebab keberadaan wanita itu sederajat dengan pria atau wanita itu setara dengan pria.

Dalam wacana hubungan Islam dan kesetaraan gender, Islam memandang perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti laki-laki. Kualitas manusia dalam Islam terletak pada prestasi seseorang tanpa mengenal perbedaan jenis kelamin.⁵³

Islam menegakkan aturan-aturan kehidupan laki-laki dan wanita berdasarkan kenyataan yang dapat menjamin keterpaduan serta kemajuan golongan dan masyarakat selain memberikan kebahagiaan yang hakiki kepada

wanita dan pria sesuai dengan kemuliaan martabat manusia yang dianugerahkan Allah swt.⁵⁴

Dalam Islam tidak diterangkan secara jelas mengenai

⁵³A. Ubaedillah, Abdul Rozak, *Pancasila Demokrasi, HAM..., Op.Cit.* h. 168

⁵⁴Abdurrahman Al Baghdadi, *Emansipasi Adakah Dalam Islam..., Op.Cit.* h. 18

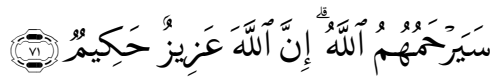
kuota perempuan dalam jabatan politik, tetapi kita dapat menyimpulkan dari beberapa ayat al- Quran mengenai perempuan dalam berpolitik. Dari ayat- ayat Al-Qur'an seperti Q.S Al-Hujurat (49) 13 perempuan dan laki-laki diciptakan Allah dengan kedudukannya yang sama, tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki baik fisik atau non fisik. Perempuan dan laki-laki mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Perempuan dan laki-laki mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Perlindungan kehormatan sesama manusia, harus berbuat baik dan saling tolong menolong antara sesama manusia, terlebih kaum perempuan, karena Allah memerintahkan kepada kita untuk melindungi dan membela kaum perempuan, membantu integrasi mereka ke dalam masyarakat dan memberikan kehidupan yang terhormat.⁵⁵

Islam telah menjelaskan bahwa perempuan boleh dan berhak berkecimpung dalam dunia politik yang merupakan area public seperti dalam Q.S At-Taubah ayat 71 yang berbunyi :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ

⁵⁵ Ahmad Zaki Yamani, *Syariat Islam Yang Kekal Dan Persoalan Masa Kini*, h. 6.



Artinya : dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Pengertian kata *auliya* mencakup kerjasama, bantuan, dan penguasaan, sedangkan pengertian menyuruh yang makruf mencakup segala kebaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat kepada penguasa. Dengan demikian, setiap laki-laki dan perempuan hendaknya mampu mengikut perkembangan masyarakatnya agar masing-masing mampu melihat dan memberi saran dan kritik dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk kehidupan politik. Islam telah memberikan persamaan kepada laki-laki dan perempuan yang pada perkembangan zaman perempuan tanpa sadar dituntut untuk lebih berkiprah khususnya dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat. Dalam Islam telah dijelaskan bahwa perempuan boleh dan berhak berkecimpung dalam bidang politik yang merupakan areapublic.

Dapat disimpulkan bahwa laki-laki beriman dengan perempuan-perempuan beriman adalah yang sebagai jadi pemimpin bagi yang lain, artinya perempuan ambil bagian yang penting di dalam menegakkan agama, bukan laki-laki saja.

Syura (musyawarah) telah merupakan salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersamamenurut Al-Qur'an, termasuk kehidupan politik, dalam arti setiap warga masyarakat dalam kehidupan bersamanya dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah. Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa setiap laki-laki maupun perempuan memiliki hak tersebut, karena tidak di temukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai melarang keterlibatan perempuan dalam bidang kehidupan bermasyarakat termasuk dalam bidang politik. Sehingga penetapan calon terpilih yang sesuai adalah berdasarkan perolehan suara terbanyak karena melihat lagi bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki adalah sama. Perempuan didalam Islam adalah kawan bagi kaum laki-laki, maka selayaknyalah jika perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki dalam pranata sosial dan masyarakat, tentunya tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan.

Kebebasan untuk menyampaikan pendapat, saling bertukar pikiran adalah prinsip yang sangat penting dalam Islam. Metodologi yang disusun oleh Islam untuk menciptakan sebuah bangsa yang berhasil ini mengajak setiap anggotanya untuk saling menasehati dan bermusyawarah satu sama lain.⁵⁶

Agama Islam menghormati hak kebebasan berfikir dan mengungkapkan pendapat kepada seluruh umat manusia. Kebebasan berpendapat ini tidak hanya diberikan kepada warga negara ketika melawan tirani. Namun juga bagi warga suatu negara untuk bebas mempunyai pendapat-pendapat yang berbeda dan mengekspresikannya berbagai masalah.

⁵⁶M.AQosimJa'far, *Perempuan Dan Kekuasaan; Menelusuri Hak Politik Dan Persoalan Gender Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2008), h. 29.

Dalam Al-Qur'an QS. Al-Annisa (4)59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah dan Al-Qur'an dan rosul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.⁵⁷

Ayat tersebut menjelaskan tentang administrasi pemerintahan dalam suatu negara dipercayakan bagi seorang *amir* atau pemimpin. Semua orang muslim yang telah dewasa mendapat hak untuk ikut serta dalam pemilihan seorang pemimpin, baik secara langsung dan tidak langsung. Dengan demikian sebagai anggota umat secara keseluruhan, perempuan juga berhak untuk menentukan nasibnya sendiri dan nasib bangsanya. Karena semua individu mempunyai hak untuk memilih kepala negara dan menduduki jabatan di jajaran pemerintahan.

Berkaitan dengan posisi perempuan dan memperoleh hak-hak politik, Islam mengakui pentingnya peran kaum perempuan dalam kehidupan masyarakat dan dampaknya

⁵⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung, Diponegoro, 2006), h. 69

dalam kehidupaun politik. Oleh karena itu kaum perempuan telah diberikan hak-hak politik yang mencerminkan status mereka yang bermartabat, terhormat dan mulia dalam Islam.

Kedudukan perempuan adalah sama dihadapan Allah. Islam mengakui kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah sama. Keduanya diciptakan dari satu nafs (*living entity*), di mana yang satu tidak memiliki keunggulan atas yang lain. Al-Qur'an sendiri tidak secara tegas menjelaskan bahwa Hawa diciptakan dari tulang tulang rusuk Nabi Adam sehingga kedudukan san statusnya lebih rendah.⁵⁸

⁵⁸A. Ubaedillah, Abdul Rozak, *Op. Cit.* h. 169.

BAB III

PENERAPAN EGALITER HAK BERPOLITIK ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI INDONESIA

A. Penerapan Egaliter Hak Berpolitik di Indonesia

Menurut Kartini Kartono, pemimpin merupakan cabang dari kelompok ilmu administrasi, khususnya ilmu administrasi Negara, dalam hal ini terdapat hubungan antar manusia, yaitu hubungan mempengaruhi (dari pemimpin), dan hubungan kepatuhan (ketaatan) para bawahan karena dipengaruhi oleh kewibawaan pemimpin.⁵⁹ Maka dalam penelitian ini perihal kepemimpinan menyangkut masalah-masalah yang menjadi persyaratan, nilai-nilai idealitas dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pelaksanaan suksesi pemimpin tersebut.

Pasca-Pemilu 1999 telah menghasilkan kemajuan berarti, sebagaimana terlihat dalam dua undang-undang politik, yaitu UU No. 31/2002⁶⁰ dan UU No. 12/2003⁶¹ Pasal 13 ayat (3) UU No. 31/2002 mengintroduksi tentang perlunya keadilan gender dalam kepengurusan parpol. Pasal 65 ayat (1) UU No. 12/2003 untuk pertama kalinya menerapkan kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam

⁵⁹Djokosantosa Moeljono, *Beyond Leadership* (Jakarta: Gramedia, 2003), h. 51.

⁶⁰Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (UU No. 31/2002) diberlakukan sejak 27 Desember 2002. Undang-undang ini merupakan pengganti dari UU No. 2/1999.

⁶¹Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 12/2003) diberlakukan sejak 11 Maret 2003. Undang-undang ini menggantikan dari UU No. 3/1999.

susunan daftar calon anggota legislatif. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kedua undang-undang itu memang sangat normatif karena tidak diikuti sanksi bagi parpol yang melanggarnya.

Meskipun demikian, jika ditarik mundur ke belakang, hal itu sesungguhnya merupakan lompatan politik luar biasa, mengingat sebelumnya rezim Orde Baru telah menyingkirkan perempuan dari arena politik. Selama 32 tahun masa Orde Baru, organisasi-organisasi perempuan diarahkan pada kegiatan sosial dan keluarga (domestifikasi) serta diawasi secara ketat.

Oleh karena itu, dengan segala keterbatasannya, ketentuan yang terdapat dalam UU No. 31/2002 dan UU No. 12/2003 harus ditempatkan sebagai batu loncatan pertama untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik padamasa mendatang. Apalagi setelah dipraktikkan melalui Pemilu 2004, ketentuan UU Pemilu itu berhasil meningkatkan jumlah perempuan di parlemen. Seperti yang terlihat dibawah ini :

Pemilu	Total Anggota DPR	Jumlah Anggota Perempuan	Persentase
1955	272	17	6,25
1971	460	36	7,83
1977	460	29	6,30
1982	460	39	8,48
1987	500	65	13,00
1992	500	62	12,50
1997	500	54	10,80
1999	500	45	9,00
2004	550	61	11,09
2009	560	101	17,86

Pemberlakuan undang-undang ini penting karena di dalamnya terdapat kuota mengenai 30 persen keterwakilan perempuan. Dan peraturan tersebut di ganti dengan Undang-Undang No.10 Tahun 2008 tentang pemilu.partai tersebut bermaksud untuk meningkatkan keterakilan perempuan di dewan perwakilan, dan di ganti lagi dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 pada pasal 55 yang menyebutkan, Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan yang mengatur kuota 30% bagi perempuan dalam daftar bakal calon anggota DPR, DPRD, provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan *zipper system* dalam setiap bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, atau 2, atau 3 dan demikian seterusnya.

Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara prinsip-prinsip kesamaan hak dan kewajiban diatur secara tegas di dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal27(1),pasal28Dayat(1)dan(2),danpasal 28Iayat(2)yangberbunyi:

- 27 ayat (1) : “Segala warga Negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak adakecualinya”
- 28 D ayat (1) : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta pengakuan yang sama dihadapan hukum,”
- 29 D ayat (2): “Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang Sama pemerintahan”
- 30 I ayat (2): “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak

mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersikap diskriminatif itu.”⁶²

Mengenai dasar hukum Jabatan Politik Perempuan dapat diuraikan sebagai berikut :

Kedudukan perempuan di Indonesia secara formal cukup kuat sebab banyak ketentuan dalam berbagai undang-undang serta peraturan lain yang memberi perlindungan yuridis padanya. Selain itu, Indonesia pun telah meratifikasi dua perjanjian, yaitu Perjanjian Hak Politik Perempuan (*Convention on the political rights of women*) dan Perjanjian Mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the political elimination of all forms of discrimination against women atau CEDAW*). Kemudian pada 1993, Indonesia telah menerima Deklarasi Wina yang sangat mendukung kedudukan perempuan. Konvensi Hak Politik Perempuan yang pada 1952 diterima PBB dan telah diratifikasi oleh DPR menjadi UU No. 68 Tahun 1958, pada pasal 1 menetapkan bahwa :

„Perempuan berhak memberikan suaranya dalam semua pemilihan dengan status sama dengan pria tanpa diskriminasi (*Women shall be entitled to vote in all election on equal terms with men without any discrimination*). Hak ini telah dilaksanakan dalam Pemilu 1955, sebelum Indonesia meratifikasi konvensi ini. Pada pasal 2 menyatakan :

”Perempuan dapat dipilih untuk semua badan elektif yang diatur dengan hukum nasional, dengan status sama dengan pria tanpa diskriminasi (*Women shall be eligible for election to all publicly elected bodies established by national law, on equal terms with men, without any discrimination*).”

⁶²UD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hak politik perempuan dirumuskan juga dalam suatu konvenan yang belum kita ratifikasi, yaitu Konvenan Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political rights*). Dinyatakan dalam pasal 3 :“Negara-negara peserta konvenan ini sepakat untuk menjamin hak yang sama bagi pria dan perempuan untuk menikmati hak-hak sipil dan politik yang dicanangkan dalam konvenan ini (*The State Parties to the present Covenant undertake to ensure the equal right of men and women to the enjoyment of all civil and political rights set forth in the present Covenant*).”Hak- hak ini antara lain mencakup hak atas hidup (Pasal 6), kesamaan di badan-badan pengadilan (Pasal 14), kebebasan mempunyai pendapat tanpa campur tangan (pihak lain) (Pasal 19). Konvenan hak Ekonomi, Sosial, Politik menyatakan hal yang serupa dalam pasal 3.⁶³

Indonesia telah lama mengesahkan Undang-Undang (UU) No.68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan. Di dalamnya, mengatur mengenai Perwujudan Kesamaan Kedudukan (non diskriminasi), jaminan persamaan hak memilih dan dipilih, jaminan partisipasi dalam perumusan kebijakan, kesempatan menempati posisi jabatan birokrasi, dan jaminan partisipasi dalam organisasi sosial politik.

Hak-hak politik tersebut antara lain mencakup: 1) Hak untuk mengungkapkan pendapat dalam pemilihan dan referendum; 2) Hak untuk mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat; 3) Hak pencalonan menjadi presiden dan hal-hal lain yang berkaitan dengan politik.Hak-

⁶³Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 258.

hak politik perempuan sampai detik ini masih merupakan masalah krusial. Sedangkan menurut al-Maududi paling tidak ada enam macam hak politik yang diakui dalam Islam, yaitu⁶⁴ :

1. Hak kebebasan untuk mengeluarkan pokok pikiran, pendapat, keyakinan. Hal ini lanjut Maududi, meliputi hak kebebasan untuk mengkritik pemerintah dan pejabatnya, termasuk kepala negara.
2. Hak untuk berserikat dan berkumpul
3. Hak untuk memilih dan dipilih sebagai kepala negara
4. Hak untuk menduduki jabatan umum dalam pemerintahan negara
5. Hak untuk memilih dan dipilih sebagai ketua atau anggota dewan permusyawaratan rakyat(DPR)
6. Hak untuk memberikan suara dalam memilih.

Selama ribuan tahun perempuan terus-menerus berada di bawah kekuasaan laki-laki dalam semua masyarakat patriarki. Kondisi ini terwujud karena kebanyakan masyarakat di dunia ini adalah masyarakat patriarki.⁶⁵ Dengan demikian jelas bahwa hak politik adalah hak bagi setiap individu untuk berpartisipasi dengan menjadi ahli badan politik dalam negara seperti contoh melibatkan diri dalam partai-partai politik, hak memilih dalam pemilu, hak menjadi wakil dalam DPR, dan sebagainya lagi hak-hak yang terkait dengan urusan-urusan negara dan pemerintahan.

⁶⁴ Mujar Ibnu Arif, *Op.Cit*, h. 65.

⁶⁵ Siti Musda Mulia & Anik Farida, *Perempuan & Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005), h.76.

B. Peranan Politik laki-laki dan perempuan di Indonesia

Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Ungkapan “setiap warga Negara” dalam ketentuan tersebut di atas tentu saja berarti warga negara laki-laki maupun negara perempuan. Walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit, berdasarkan ketentuan Pasal 27 tersebut dapat diartikan pula bahwa UUD 1945 sudah menganut prinsip non diskriminatif. Dengan prinsip non diskriminatif tersebut, maka perempuan sebagai warganegara dapat dikatakan memperoleh peluang yang sama dengan laki-laki dalam pemerintahan.

Tahun 1978 merupakan tonggak sejarah yang mempunyai arti yang amat penting bagi kaum perempuan Indonesia, karena pada tahun tersebut tercantum untuk pertama kali Garis-Garis Besar Hukum Negara (GBHN) dan Pelita III secara eksplisit memuat butir-butir tentang peranan perempuan dalam pembangunan dan pembinaan bangsa. Pada tahun itu juga pada Kabinet Pembangunan III dibentuk suatu lembaga, yaitu Kantor Menteri Muda Urusan Peranan Wanita. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia secara sadar mengakui pentingnya peranan perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki dalam pembangunan.

Sedikitnya jumlah perempuan di parlemen dan pertimbangan perlunya perempuan terlibat lebih banyak dalam pengambilan keputusan, mendorong lahirnya gerakan peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen. Gerakan ini dipelopori oleh aktivis, kelompok, dan organisasi perempuan,

yang muncul secara terbuka menjelang jatuhnya rezim orde baru pada 21 mei 1998, tetapi mereka mulai bekerja secara sistematis pasca-pemilu tahun 1999.

Mereka membawa konsep affirmative action (kebijakan afirmasi)⁶⁶ dalam bentuk kuota keterwakilan perempuan untuk diadopsi dalam pengaturan sistem pemilu demokratis. Konstitusi mengakui adanya kebijakan afirmasi yakni setelah berlakunya perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 yaitu Pasal 28 H ayat (2) yang menyatakan “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Penerapan kebijakan ini di beberapa negara ternyata efektif meningkatkan jumlah perempuan di parlemen.

Demokrasi menuntut sistem perwakilan yang memungkinkan semua kelompok masyarakat terwakili. Tujuannya agar dalam pengambilan keputusan tidak ada kelompok yang ditinggalkan. Namun sejak gagasan demokrasi dipraktikan, parlemen menekankan pentingnya politik kehadiran, yaitu kesetaraan perwakilan antara laki-laki dan perempuan, keseimbangan perwakilan di antara kelompok-kelompok yang berbeda, dan melibatkan kelompok-kelompok termajinalkan ke dalam lembaga perwakilan.

⁶⁶Affirmative action merupakan diskriminasi positif (positive discrimination) atau langkah-

langkah khusus yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan. Salah satu sarana terpenting untuk menerapkannya adalah hukum. Karena jaminan pelaksanaannya harus ada dalam Konstitusi dan UU. Regulasi kuota adalah bagian dari affirmative policy atau disebut juga diskriminasi positif yang bersifat sementara sampai kesenjangan sosial tersebut teratasi.

Ketidak seimbangan komposisi anggota parlemen Indonesia sekaligus menjadi representasi masyarakat patriarkhi, di mana laki-laki mengatur kehidupan sesuai dengan kepentingan politik. Dalam masyarakat patriarkhi, laki-laki mencegah perempuan memasuki ruang publik, sementara mereka bolak-balik memasuki ruang privat dan ruang publik dengan ketentuan-ketentuan hukum yang mereka buat dan menguntungkan dirinya.

Sebagaimana tampak dalam produk legislasi, materi-materi undang-undang yang dikeluarkan DPR lebih banyak berkaitan dengan dunia laki-laki, seperti pertahanan, keamanan, kepolisian, korupsi, investasi, perdagangan dan lain-lain. Sementara masalah kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, kesenian, lingkungan, atau perlindungan, anak tidak banyak disentuh. diinginkannya. Mayoritas laki-laki di DPR sulit untuk diharapkan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan sebab mereka tidak mengalami dan memahami apa yang dirasakan dan diinginkan perempuan.

Sedikitnya jumlah perempuan di parlemen dan pertimbangan perlunya perempuan terlibat lebih banyak dalam pengambilan keputusan, mendorong lahirnya gerakan peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen. Gerakan ini dipelopori oleh aktivis, kelompok, dan organisasi perempuan, yang muncul secara terbuka menjelang jatuhnya rezim orde baru pada 21 Mei 1998, tetapi mereka mulai bekerja sistematis pasca pemilu 1999. Mereka membawa konsep *affirmative action* (kebijakan afirmasi) dalam bentuk kuota keterwakilan perempuan untuk diadopsi dalam pengaturan sistem pemilu demokratis. Konstitusi mengakui adanya kebijakan afirmasi

dan penerapan kebijakan ini di beberapa negara ternyata efektif meningkatkan jumlah perempuan di parlemen.

Wanita Indonesia memiliki peranan dalam pembangunan di bidang politik, baik terlibat dalam kepartaian, legislatif, maupun dalam pemerintahan. Partisipasi dalam bidang politik ini tidaklah semata-mata hanya sekedar perlengkap saja melainkan harus berperan aktif di dalam pengambilan keputusan politik yang menyangkut kesinambungan Negara dan bangsa.

Hak suara wanita memiliki kesejajaran dengan laki-laki dalam hal mengambil dan menentukan keputusan. Begitupula apabila wanita terlihat dalam pemulihan umum untuk memilih salah satu partai politik yang menjadi pilihannya, apalagi ia duduk sebagai pengurus dari salah satu partai.

Dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berkembang di masyarakat yang berupaya membuat perbedaan peran, perilaku, mentalitas, dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut sudah lama melekat dalam pandangan umum masyarakat sehingga melahirkan anggapan bahwa perbedaan peran tersebut sebagai sesuatu yang bersifat kodrati dan telah menimbulkan ketimpangan pola hubungan dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan.⁶⁷

Konsep budaya yang telah dianggap sebagai sesuatu yang kodrati tersebut dapat dilihat pada anggapan umum, misalnya, perempuan identik dengan urusan rumah tangga semata, sedangkan laki-laki sebaliknya, identik dengan pengelola dan penanggung jawab urusan ekonomi.

⁶⁷A.Ubaedillah, Abdul Rozak, *Pancasila Demokrasi...*, Op.Cit.h. 167

Ketimpangan ini terjadi karena adanya aturan, tradisi, dan hubungan timbal balik yang menentukan batas antara feminitas dan maskulinitas sehingga mengakibatkan adanya pembagian peran, dan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Dalam kehidupan sosial misalnya, berkembang anggapan bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan, karena laki-laki dianggap lebih cerdas, kuat, dan tidak emosional. Semua anggapan superioritas laki-laki tidak lain merupakan produk budaya belaka. Produk atau konstruk budaya tentang gender tersebut telah melahirkan ketidakadilan gender.

Sebagai bagian gerakan demokrasi, perjuangan perempuan untuk meningkatkan jumlah perempuan di parlemen harus dilakukan dengan cara-cara demokratis, yakni melalui pemilu yang jujur dan adil. Di sinilah perlunya gerakan peningkatan keterwakilan perempuan memilih sistem pemilu yang memberi kesempatan lebih terbuka bagi para calon perempuan untuk memasuki parlemen. Dalam pemilihan sistem pemilu, konstitusi sesungguhnya sudah berpihak kepada perempuan. Hal ini terlihat dari penggunaan sistem pemilu proporsional untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.⁶⁸

Sebagaimana tampak dalam produk legislasi, materi-materi undang-undang yang dikeluarkan DPR lebih banyak berkaitan dengan dunia laki-laki, seperti pertahanan, keamanan, kepolisian, korupsi, investasi, perdagangan, dan lain lain. Sementara masalah kesejahteraan, kesehatan, pendidikan,

⁶⁸Ramlan Surbakti, Didik suprianto dan Hasyim Asyari, *Meningkatkan Keterwakilan Perempuan*, (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011), h. 5.

kesenian, lingkungan, atau perlindungan anak tidak banyak disentuh.

Rendahnya perwakilan perempuan tersebut tidak semata-mata merugikan kelompok perempuan, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Kepedulian perempuan terhadap isu-isu kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, anti kekerasan, dan lingkungan, tidak bisa berbuah menjadi kebijakan selama mereka tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Pengalaman hidup dan kepedulian perempuan yang khas menjadikan mereka harus memperjuangkan sendiri apa yang diinginkannya. Mayoritas laki-laki di DPR sulit diharapkan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan sebab mereka tidak mengalami dan memahami apa yang dirasakan dan diinginkan perempuan.

Menurut Richard Matland, berdasarkan logika matematika yang didukung oleh data hasil pemilu banyak negara, dapat disimpulkan bahwa sistem pemilu proporsional paling banyak meningkatkan jumlah perempuan di parlemen. Namun penggunaan sistem proporsional tidak dengan sendirinya akan menghasilkan perempuan di parlemen lebih banyak karena hal itu masih tergantung pada pengoperasian variabel teknis pemilu dalam sistem pemilu.⁶⁹

Jabatan politik tidak mensyaratkan apapun kepada seseorang untuk menduduki jabatan politik tertentu. Karna tidak mensyaratkan sesuatu, maka menarik berbagai pihak untuk terjun secara instan di jabatan politik tersebut. Contohnya sudah jamak terjadi pada para artis yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR bermodal keartisannya.

⁶⁹Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik...*, *Op.Cit.* h. 127.

Naiknya Megawati Sukarno Putri sebagai presiden RI menggantikan K.H. Abdurrahman Wahid menimbulkan banyak polemik, tidak hanya dalam skala lokal namun juga internasional. Para ulama Islam kembali mempertanyakan keabsahan presiden wanita menurut hukum Islam. Panglima laskar jihad Ja'far Umar Thalib dalam home page Laskar Jihad mengatakan bahwa ia tetap konsisten dengan keyakinannya atas larangan presiden wanita.

C. Egaliter Hak Berpolitik antara Laki-laki dan Perempuan di Indonesia

Kerja keras gerakan perempuan pasca-Pemilu 1999 telah menghasilkan kemajuan berarti, sebagaimana terlihat dalam dua undang-undang politik, yaitu UU No. 31/2002⁷⁰ dan UU No. 12/2003⁷¹ Pasal 13 ayat (3) UU No. 31/2002⁷⁰ mengintroduksi tentang perlunya keadilan gender dalam kepengurusan parpol. Pasal 65 ayat (1) UU No. 12/2003⁷¹ untuk pertama kalinya menerapkan kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam susunan daftar calon anggota legislatif. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kedua undang-undang itu memang sangat normatif karena tidak diikuti sanksi bagi parpol yang melanggarnya.

⁷⁰Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (UU No. 31/2002) diberlakukan sejak 27 Desember 2002. Undang-undang ini merupakan pengganti dari UU No. 2/1999.

⁷¹Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 12/2003) diberlakukan sejak 11 Maret 2003. Undang-undang ini menggantikan dari UU No. 3/1999.

Meskipun demikian, jika ditarik mundur ke belakang, hal itu sesungguhnya merupakan lompatan politik luar biasa, mengingat sebelumnya rezim Orde Baru telah menyingkirkan perempuan dari arena politik. Selama 32 tahun masa Orde Baru, organisasi-organisasi perempuan diarahkan pada kegiatan sosial dan keluarga (domestifikasi) serta diawasi secara ketat.

Oleh karena itu, dengan segala keterbatasannya, ketentuan yang terdapat dalam UU No. 31/2002 dan UU No. 12/2003 harus ditempatkan sebagai batu loncatan pertama untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik pada masa mendatang.

Pemberlakuan undang-undang ini penting karena di dalamnya terdapat kuota mengenai 30 persen keterwakilan perempuan, dan peraturan tersebut di ganti dengan Undang-Undang No.10 Tahun 2008 tentang pemilu. partai tersebut bermaksud untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di dewan perwakilan, dan di ganti lagi dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 pada pasal 55 yang menyebutkan, Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan yang mengatur kuota 30% bagi perempuan dalam daftar bakal calon anggota DPR, DPRD, provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan zipper system dalam setiap bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, atau 2, atau 3 dan demikian seterusnya.

Kaum perempuan selalu menjadi objek pembicaraan, terutama pada masa yang berdekatan dengan dilaksanakannya pemilihan umum (pemilu). Pemilihan umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya

sendi- sendi demokrasi dan bahkan menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat, tetapi harus menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankan UUD 1945.

Pemilihan umum bertujuan dalam mewujudkan penyusunan tata kehidupan yang dijiwai semangat cita-cita Revolusi Kemerdekaan RI proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana tersebut dalam Pancasila dan UUD 1945, maka penyusunan tata kehidupan itu harus dilakukan dengan jalan pemilihan umum.

Dengan demikian, diadakan pemilihan umum tidak sekedar memilih wakil- wakil rakyat untuk duduk dalam lembaga permusyawaratan atau perwakilan, dan juga tidak memilih wakil-wakil rakyat untuk menyusun negara baru, tetapi suatu pemilihan wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawa isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan, mempertahankan dan mengembangkan kemerdekaan NKRI bersumber pada Proklamasi 17 Agustus 1945 guna memenuhi dan mengemban amanat penderitaan rakyat.⁷²

Pada dasarnya pemilihan umum memang merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan politik yang demokratis, sehingga nantinya laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kebebasan dalam menentukan hak pilihnya, yang pada hakekatnya hubungan dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan haruslah sama, seimbang dan setara.

Mereka membawa konsep affirmative action (kebijakan afirmasi) dalam bentuk kuota keterwakilan perempuan untuk

⁷²Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 147.

diadopsi dalam pengaturan sistem pemilu demokratis. Konstitusi mengakui adanya kebijakan afirmasi yakni setelah berlakunya perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pasal 28 H ayat (2) yang menyatakan “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Penerapan kebijakan ini di beberapa negara ternyata efektif meningkatkan jumlah perempuan di parlemen.

Demokrasi menuntut sistem perwakilan yang memungkinkan semua kelompok masyarakat terwakili. Tujuannya agar dalam pengambilan keputusan tidak ada kelompok yang ditinggalkan. Namun sejak gagasan demokrasi dipraktikkan, parlemen tidak pernah mewakili semua kelompok yang ada di masyarakat. Kenyataan ini menyebabkan parlemen sering mengeluarkan kebijakan yang justru mendiskriminasi kelompok masyarakat yang diklaim diwakilinya.

Itu artinya, jika perempuan Indonesia hanya diwakili oleh beberapa orang saja, sebanyak 101 juta lebih perempuan Indonesia terdiskriminasi oleh kebijakan DPR. Oleh karena itu, perlu dilakukan kembali pemaknaan demokrasi perwakilan, dengan menekankan pentingnya politik kehadiran, yaitu kesetaraan perwakilan antara laki-laki dan perempuan, keseimbangan perwakilan di antara kelompok – kelompok yang berbeda, dan melibatkan kelompok-kelompok termajinalkan ke dalam lembaga perwakilan.

Ketidak seimbangan komposisi anggota parlemen Indonesia sekaligus menjadi representasi masyarakat patriarkhi, di mana laki-laki mengatur kehidupan sesuai dengan kepentingan politik. Dalam masyarakat patriarkhi,

laki-laki mencegah perempuan memasuki ruang publik, sementara mereka bolak-balik memasuki ruangprivat dan ruang publik dengan ketentuan-ketentuan hukum yang mereka buat dan menguntungkan dirinya.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG EGALITER HAK BERPOLITIK ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI INDONESIA

Setelah mengumpulkan data yang bersifat kepustakaan baik yang diperoleh dari kitab-kitab aslinya atau kitab-kitab terjemahan dan buku-buku yang berkaitan dengan judul karya tulis ini yaitu tentang „Egaliter Hak Berpolitik Antara Laki-laki dan perempuan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, yang kemudian dituangkan dalam menyusun pada bab-bab terdahulu, maka sebagai langkah selanjutnya akan menganalisis data yang telah dikumpulkan itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

A. Egaliter Hak Berpolitik antara Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Berbicara tentang hukum Islam memungkinkan timbulnya banyak tafsiran, sepihak dan subjektif. Secara horizontal tidak ada kekuatan yang mampu menekan kebebasan individu lain, baik itu negara, pemilik modal, atau kekuatan individu.. Semuanya memiliki nilai dan perlakuan yang sama dihadapan Allah Swt. Hanya satu yang menjadi pembeda, yaitu kadar ketakwaan kepada Allah Swt. Oleh karena itu, Islam sebenarnya menjadi sarana yang tepat untuk mempersatukan visi dan misi kesetaraan laki-laki dan perempuan.

Pada dasarnya *ahlul halli wal aqdi* adalah orang-orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wakil-wakilnya karena ikhlas, konsekuen, takwa,

adil dan kejernihan pikiran serta kegigihan mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya.

Kebijakan pemerintah tentang kuota perempuan dalam jabatan politik di Indonesia diatur melalui beberapa peraturan, peraturan ini menegaskan mengenai sistem pencalonan anggota legislatif. Untuk persoalan mengenai pencalonan anggota legislatif perempuan hanya diberikan kuota sebanyak 30%.

Sebagai seorang muslim sudah selayaknya menjadikan Islam sebagai cara pandangnya dalam memandang, menghadapi dan menyelesaikan segala persoalan. Islam telah memberikan persamaan kepada laki-laki maupun perempuan yang pada perkembangan zaman perempuan tanpa sadar dituntut pasti akan memelihara, mengurus, mengembangkan jalannya roda pemerintahan seperti tugas khalifah.

Dalam Islam tidak diterangkan secara jelas mengenai kuota perempuan dalam jabatan politik, tetapi kita dapat menyimpulkan dari beberapa ayat al- Quran mengenai perempuan dalam berpolitik. Dari ayat- ayat Al-Qur'an seperti Q.S Al-Hujurat (49) 13 perempuan dan laki-laki diciptakan Allah dengan kedudukan yang sama, tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki baik fisik atau non fisik. Perempuan dan laki-laki mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing

Islam telah menjelaskan bahwa perempuan boleh dan berhak berkecimpung dalam dunia politik yang merupakan area publik seperti dalam Q.S At-Taubah (9) 71 yang berbunyi :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
 بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
 وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ
 اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦١﴾

Artinya : dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Pengertian kata auliya mencakup kerjasama, bantuan, dan penguasaan, sedangkan pengertian menyuruh yang makruf mencakup segala kebaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat kepada penguasa. Dengan demikian, setiap laki-laki dan perempuan hendaknya mampu mengikut perkembangan masyarakatnya agar masing-masing mampu melihat dan memberi saran dan kritik dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk kehidupan politik.

Islam juga tidak melarang perempuan menduduki jabatan kementerian atau jabatan yang lebih tinggi lagi. Tidak ada nash yang jelas dan pasti dalam Al- Quran dan sunnah yang melarang hal demikian.

Dan ditemukan juga sekian banyak dalil keagamaan yang dapat dijadikan dasar untuk mendukung hak-hak perempuan dalam bidang politik. Yang diantaranya mengajak umatnya lelaki dan perempuan untuk bermusyawarah, yang terkandung dalam surat Asy-Syuura ayat 38 :

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٣٨﴾

Artinya : lalu dikumpulkan Ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang ma'lum.

Ayat tersebut dijadikan dasar oleh banyak ulama untuk membuktikan adanya hak politik bagi setiap laki-laki dan perempuan. Syura (musyawarah) telah merupakan salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama menurut Al-Qur'an, termasuk kehidupan politik, dalam arti setiap warga masyarakat dalam kehidupan bersamanya dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah. Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa setiap laki-laki maupun perempuan memiliki hak tersebut, karena tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai melarang keterlibatan perempuan dalam bidang kehidupan bermasyarakat termasuk dalam bidang politik.

Sehingga penetapan calon terpilih yang sesuai adalah berdasarkan perolehan suara terbanyak karena melihat lagi bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki adalah sama. Perempuan didalam Islam adalah kawan bagi kaum laki-laki, maka selayaknyalah jika perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki dalam pranata sosial dan

masyarakat, tentunya tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan.

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, Pemilu tahun 2004 adalah pemilu yang ke –9. Dari hasil Pemilu tahun 1999, kuota perempuan rata-rata 8,8 persen di legislatif , 6 persen di provinsi dan 2,5 persen di kabupaten. Berdasarkan kenyataan tersebut, tidak heran menjelang pemilu, koalisi Perempuan Indonesia meminta kuota gender dimasukkan dalam rancangan Undang-Undang Partai Politik dan RUU Pemilu. Dalam draft yang diajukan Koalisi, mereka meminta perempuan mendapat porsi minimal 30 persen, baik di partai politik maupun badan legislatif.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pelaksanaan Pemilu kali ini tetap berusaha agar kuota tersebut bisa diterapkan oleh partai politik peserta Pemilu, Karena memang tidak ada sanksi bagi partai yang tidak memenuhi kuota tersebut, maka KPU membuat kebijakan untuk mengumumkan kepada masyarakat luas, nama-nama partai yang tidak memenuhi kuota 30 persen dalam mencalonkan perempuan untuk menjadi legislatif dari partainya. Dengan pengumuman ini masyarakat akan mengetahui dan bisa menentukan sendiri, apakah mau memilih partai yang tidak memberikan kuota 30 persen kepada perempuan. Sebagaimana pasal yang menjadi dasar diwajibkannya kuota 30% keterwakilan calon legislatif perempuan adalah pasal 55 yang berbunyi:

“Daftar bakal calon sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”, dan diperkuat dengan pasal yang menyebutkan adanya sanksi apabila kuota keterwakilan

perempuan ini tidak dipenuhi oleh partai politik, yakni pasal 59 ayat (2) dan (3) yang berbunyi: Pasal 59 ayat (2) ”Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat sekurang kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut”. Pasal 59 ayat (3) “Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dengan peraturan KPU”.

Selain UU No 8 tahun 2012 dalam pemilu tahun 2014 juga terdapat Peraturan KPU No 7 tahun 2013 tentang Aturan Pencalonan DPR, DPD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Keberadaan Peraturan KPU No 7 Tahun 2013 menjadi terasa sangat berarti. Peraturan ini menegaskan mengenai sistem pencalonan anggota legislatif. Untuk persoalan mengenai pencalonan anggota legislatif perempuan, peraturan ini menegaskan beberapa hal, seperti kuota 30% perempuan di setiap daerah pemilihan dan urutan penempatan daftar bakal calon perempuan (dengan sistem dalam setiap tiga bakal calon harus ada satu bakal calon perempuan). Dalam membicarakan affirmative action yakni tentang kebijakan kuota 30% dapat dijadikan langkah awal dalam memajukan kesetaraan dan keadilan gender dalam ranah politik, tindakan khusus sementara untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dengan sistem kuota 30% sehingga mencapai sedikitnya minoritas kritis yaitu 30 % dari total anggotaparlemen. Tetapi persoalan tidak soal kuota saja karena daftar caleg yang disusun oleh partai peserta pemilu menepatkan

perempuan pada daftar nomor bawah sehingga sulit untuk menang dalam pemilu, sedangkan laki-laki tetap pada nomor urut teratas.

Namun, peraturan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, di dalam Pasal 27 (1), Pasal 28 D ayat (1) dan (2), dan Pasal 28 I ayat (2) dijelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan yang sama, sehingga kebijakan kuota 30 % tersebut tidak sesuai dengan UUD yang berbunyi:

27 ayat (1) : “Segala warga Negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

28 D ayat (1) : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta pengakuan yang sama dihadapan hukum,” 28 D ayat (2) : “Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”

28 I ayat (2) : “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersikap diskriminatif itu.”

Berdasarkan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 tersebut, kebijakan pemerintah tentang kuota 30% pada perempuan dalam jabatan politik dinilai tidak adil. Karena kuota perempuan tersebut membuat terbatasnya perempuan untuk terlibat dalam dunia politik. Seharusnya penetapan calon terpilih yang sesuai adalah berdasarkan perolehan suara terbanyak dan tidak ditetapkannya pemberian kuota 30% pada perempuan. Mengingat UUD 1945 tidak membedakan laki-laki dan perempuan, yang pada dasarnya

perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk terlibat dalam dunia politik.

Dalam konteks demokrasi, baik laki-laki maupun perempuan berhak memiliki hak politik, bahkan sangat dilindungi oleh berbagai perangkat hukum dan Undang-Undang. Sejumlah perempuan yang konsisten tetap eksis di jalur politik terlepas atas pro dan kontra, Demokrasi menuntut sistem perwakilan yang memungkinkan semua kelompok masyarakat terwakili. Tujuannya agar dalam pengambilan keputusan tidak ada kelompok yang ditinggalkan.

Demokrasi kemudian memberi kontribusi yang sangat besar terhadap gerakan perempuan di seluruh dunia. Demokrasi menjadi pemicu kebangkitan perempuan untuk ikut andil dalam segala hal yang berhubungan dengan negara. Demokrasi bagai pembakar semangat perempuan untuk bangkit di tengah keterpurukannya di dalam melawan hegemoni negara yang lebih mengedepankan laki-laki di arena publik ketimbang perempuan. Demokrasi bagaikan obat mujarab yang tidak boleh tertolak oleh kaum perempuan yang bijak terhadap negara, terhadap kebaikan bersama, terhadap kepentingan bersama.

Dengan demikian pemberdayaan perempuan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender merupakan komitmen bangsa Indonesia yang pelaksanaannya menjadi tanggungjawab seluruh pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, tokoh-tokoh agama dan masyarakat secara keseluruhan. Sesuai dengan dua arahan kebijakan itu, pemerintah bertanggungjawab untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pemberdayaan perempuan di tingkat nasional maupun daerah, yang pelaksanaannya dapat memberikan hasil

terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di segala bidang khususnya di bidang politik.

B. Persamaan dan Perbedaan Egaliter Hak Berpolitik antara Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Di dalam berpolitik, hak antara laki-laki dan perempuan seringkali menjadi perdebatan. Perempuan dianggap tidak pantas untuk berpolitik. Banyak hal perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan perempuan dipandang sebelah mata oleh masyarakat, diantaranya adalah:

1. laki-laki dianggap lebih cerdas, kuat, dan tidak emosional.
2. Berkaitan dengan produk legislasi, materi-materi undang-undang yang dikeluarkan DPR lebih banyak berkaitan dengan dunia laki-laki, seperti pertahanan, keamanan, kepolisian, korupsi, investasi, perdagangan, dan lain lain. Sementara masalah kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, kesenian, lingkungan, atau perlindungan anak tidak banyak disentuh. Hal ini menjadi salah satu alasan agar perempuan tidak perlu terlalu ditonjolkan terutama dalam bidang politik
3. Laki-laki dipandang lebih pantas untuk, menjadi seorang pemimpin karena pada hakikatnya laki-laki merupakan seorang pemimpin bagi keluarganya. Maka dapat diyakini bahwa laki-laki juga dapat berpolitik bahkan menjadi pemimpin bagi negaranya.

Namun meskipun demikian, Islam tidak pernah membedakan antar gender baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini disebabkan karena beberapa persamaan yang dimiliki antara keduanya, yaitu:

1. Jika dilihat dalam hal warisan *Pertama*, dengan memberi bagian warisan kepada perempuan serta mendudukan laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai subyek penerima warisan, maka berarti hukum Islam telah melakukan reformasi yang cukup revolusioner dan radikal terhadap hukum Jahiliyyah yang telah ada sebelumnya, yaitu tidak menjadikan perempuan sebagai subyek penerima harta warisan dan bahkan bisa menjadi harta warisan itu sendiri. *Kedua*, *setting* sosial ekonomi dalam kehidupan keluarga pada masamunculnya aturan hukum tersebut adalah beban nafkah keluarga ditanggung oleh laki-laki, sehingga pembagian warisan yang membagi laki-laki dengan bagian warisan yang lebih besardaripada bagian warisan perempuan merupakan pembagian yang adil.⁷³
2. Al-Qur'an menunjukkan bahwa pada dasarnya kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama. Keduanya diciptakan dari satu *nafs* (*living entity*), di mana yang satu tidak memiliki keunggulan terhadap yang lain. Dengan kata lain, laki-laki memiliki hak dan kewajiban atas perempuan, dan kaum perempuan juga memiliki hak dan kewajiban terhadap kaum laki-laki.
3. bahwa perempuan seperti laki-laki. Masing- masing mereka boleh berpartisipasi dalam politik dan mengatur urusan masyarakat, dan mempunyai hak dalam mengatur kepentingan umum. Tetapi pengertian secara umum ialah bahwa hak politik berarti hak memilih dan dipilih, serta hak menjalankan tugas-tugas umum tanpa ada perbedaan

⁷³Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, cet. II (Bandung: Mizan, 1997), h. 52-53.

jenis kelamin.⁷⁴ Bukan hanya itu, Hak- hak politik ini juga mencakup :

- a. Hak dalam mengungkapkan pendapat dalam pemilihan dan refrendum dengan berbagai cara.
- b. Hak dalam pencalonan menjadi anggota lembaga perwakilan dan anggota setempat.
- c. Hak dalam pencalonan menjadi presiden dan hal-hal lain yang mengandung persekutuan dan penyampaian pendapat yang berkaitan dengan politik.⁷⁵

Egaliter hak berpolitik antara laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam dan hukum Positif, baik dalam Al-Qur'an dan UUD bahwa kesetaraan tentang hak berpolitik Antara laki-laki dan perempuan dijelaskan seperti dalam Q.S Al-Hujarat (49) 13 yang berbunyi, “Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”, Ayat di atas menjelaskan perempuan dan laki-laki diciptakan Allah dengan kedudukan yang sama, tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga laki-laki maupun perempuan mampu untuk masuk dalam dunia politik.

⁷⁴Muhammad Ali Quthub, *Bai'at Kaum Wanita Terhadap Rasulullah* (Surabaya: Bina Ilmu 1984) h. 90.

⁷⁵AQosimJa"far, *Perempuan Dan Kekuasaan; Menelusuri Hak Politik Dan Persoalan Gender Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2008), h. 25.

Undang-Undang Dasar (UUD) pasal 27 ayat (1) dijelaskan bahwa „Setiap warga Negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Sehingga laki-laki dan perempuan dengan bebas untuk memasuki dunia politik. Melihat pandangan di atas jelas bahwa persamaan tentang egaliter hak berpolitik antara laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam dan hukum positif, UUD 1945 dan Hukum Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan, yang pada dasarnya perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk terlibat dalam dunia politik. Dalam konteks demokrasi, baik laki-laki maupun perempuan berhak memiliki hak politik, bahkan sangat dilindungi oleh berbagai perangkat hukum dan Undang-Undang. Pada dasarnya pemilihan umum memang merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan politik yang demokratis, sehingga nantinya laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kebebasan dalam menentukan hak pilihnya, yang pada hakekatnya hubungan dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan haruslah sama, seimbang dan setara.

Perbedaan dan persamaan yang terjadi dalam egaliter hak berpolitik Antara laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam dan hukum positif yaitu:

NO	Persamaan	Perbedaan
1	Hukum Islam dan hukum positif memperbolehkan perempuan untuk terlibat dalam dunia politik	Hukum Islam membolehkan perempuan untuk terlibat dalam dunia politik namun ada batasan untuk tidak boleh menjadi seorang presiden, hukum positif tidak membatasi perempuan untuk menjadi presiden
2	Hukum Islam dan Hukum positif memperbolehkan laki-laki dan perempuan memilih seorang pemimpin atau presiden	Hukum Islam tidak memperbolehkan perempuan untuk dipilih menjadi pemimpin atau presiden, hukum positif memperbolehkan perempuan untuk memilih dan dipilih menjadi pemimpin atau presiden
3	Hukum Islam dan hukum positif memperbolehkan laki-laki dan perempuan untuk mengikuti pemilu sebagai calon anggota Legislatif	Hukum Islam tidak ada aturan yang jelas tentang kuota minimal keikutsertaan perempuan dalam pemilu legislatif, hukum positif memberika batas minimal keikutsertaan perempuan sebesar 30% bagi partai peserta pemilu.

Berdasarkan tentang hak-hak politik perempuan dalam Islam adalah bahwa ada beberapa hak yang telah ditetapkan oleh Allah untuk perempuan dalam masyarakatnya yang memiliki elemen-elemen utama dan ciri-ciri khas yang membedakannya dari masyarakat lainnya. Islam adalah agama yang komprehensif dan syariat yang tidak bisa dibagi-bagi. Artinya, ketika Islam telah menetapkan untuk perempuan apa yang telah ia tetapkan dari hak-hak politik, yang diantaranya adalah ikut berpartisipasi dalam urusan-urusan umum, Islam menegakkan itu untuk menegakkan hukum di negara muslim berdasarkan kaidah musyawarah, prinsip persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negaranya, prinsip pertanggungjawaban penguasa, prinsip keadilan, serta prinsip-prinsip mendasar yang dijadikan Islam sebagai dasar-dasar yang baku dalam sistem hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang penyusun lakukan, akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa Egaliter Hak Berpolitik Antara Laki-laki dan Perempuan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia sebagai berikut:

1. Egaliter hak berpolitik antara laki-laki dan perempuan menurut hukum Islam, dalam Islam tidak diterangkan secara jelas mengenai kuota perempuan dalam jabatan politik, tetapi firman Allah menjelaskan bahwa kedudukan perempuan dengan laki-laki sama, secara horizontal tidak ada kekuatan yang mampu menekan kebebasan individu lain, baik itu negara, pemilik modal, atau kekuatan individu.. Semuanya memiliki nilai dan perlakuan yang sama dihadapan Allah Swt. Hanya satu yang menjadi pembeda, yaitu kadar ketakwaan kepada Allah Swt. Oleh karena itu, Islam sebenarnya menjadi sarana yang tepat untuk mempersatukan visi dan misi kesetaraan laki-laki dan perempuan. Sedangkan dalam hukum positif, dalam konteks demokrasi, baik laki-laki maupun perempuan berhak memiliki hak politik, bahkan sangat dilindungi oleh berbagai perangkat hukum dan Undang-Undang. Sejumlah perempuan yang konsisten tetap eksis di jalur politik terlepas atas pro dan kontra, Demokrasi menuntut sistem perwakilan yang memungkinkan semua kelompok masyarakat terwakili. Tujuannya agar dalam pengambilan keputusan tidak ada kelompok yang ditinggalkan.
2. Egaliter hak berpolitik antara laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam dan hukum positif mempunyai

persamaan yaitu :hak berpolitik antara laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam dan hukum positif, Mengingat UUD 1945 dan Hukum Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan, yang pada dasarnya perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk terlibat dalam dunia politik. Dalam konteks demokrasi, baik laki-laki maupun perempuan berhak memiliki hak politik, bahkan sangat dilindungi oleh berbagai perangkat hukum dan Undang-Undang. Pada dasarnya pemilihan umum memang merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan politik yang demokratis, sehingga nantinya laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kebebasan dalam menentukan hak pilihnya, yang pada hakekatnya hubungan dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan haruslah sama, seimbang dan setara. Dan Segala warga Negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sedangkan perbedaanya terlihat pada bagaimana hukum Islam tidak membedakan eksistensi antara laki-laki dan perempuan dalam kapasitasnya sebagai hamba Allah, khalifah, dan perjanjian primordial dengan Allah, namun harus digaris bawahi terdapat batasan bagi perempuan untuk tidak diperbolehkan menjadi pemimpin atau presiden, di samping itu, Islam juga tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan kerja dan meraih prestasi yang setinggi-tingginya pada bidang-bidang yang dibenarkan Islam, dan dalam hukum positif ada pembatasan tentang kouta jumlah minimum keikutsertaan perempuan dalam

berpolitik yaitu yang diatur dalam dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 pada Pasal 55 yang menyebutkan, daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan yang mengatur kuota 30% bagi perempuan.

B. Saran

1. Kepada para ulama tidak ada dalil atau nash yang melarang pasti bahwa perempuan tidak mempunyai hak untuk menjadi pemimpin, karena kemitrasejajaran telah diajarkan dalam Islam dan setiap fatwa pasti lah berubah sesuai kondisi dan situasi.
2. Kepada pemerintah mengenai kebijakan tentang kuota perempuan dalam jabatan politik sebaiknya di evaluasi kembali. Mengingat UUD 1945 dengan jelas mengatakan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Abdul Khaliq, Farid, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Abdul Rozak, A.Ubaedillah Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, Jakarta : Prenada Media Group, cetakan ke-8, 2012.
- Abdurrahman Al Baghdadi, *Emansipasi Adakah Dalam Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 1994.
- Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, Jakarta : Pustaka Hidayah, 1999.
- Abu al-Hasan 'Ali bin Ahmad al-Wahidi, *Asbab al-Nuzul*, Abu al-Qasim Hibatullah ibn Salamah Abu Nashr (pentahqiq), Kairo: Maktabah al-Dakwah, t.t
- Ahmad, „Pemimpin Perempuan” (On-Line), tersedia di : [http : / / kepemimpinan– fisipuh.blogspot.com](http://kepemimpinan-fisipuh.blogspot.com), (10/03/2018)
- Ali Quthub, Muhammad, *Bai'at Kaum Wanita Terhadap Rasulullah*, Surabaya: Bina Ilmu 1984.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi II, Jakarta : Renika Cipta, 1993.
- Asikin, Zainal Arifin, Amiruddin *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Balai Pustaka, 2006.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Bandung : Diponegoro, 2006

Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Kantor Balai Pustaka, 1989.

Djokosantosa Moeljono, *Beyond Leadership*, Jakarta: Gramedia, 2003.

Frenki, *Politik Hukum Islam*, LP2M IAIN RADEN INTAN, 2015.

H. Inu Kencana Syafie, *Ilmu Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Hamka, *Tafsir Al-Azhar juz IX-X*, Jakarta: Panjimas, 2005.

Ilyas, Yunahar, *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: Labad Press, 2006.

Iqbal, Muhammad , *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Irwantoni, Buku Darras : *Ilmu Hukum Seri Pengantar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung : Puskima Fakultas Ushuluddin, 2009.

Ja'far, A Qosim, *Perempuan Dan Kekuasaan; Menelusuri Hak Politik Dan Persoalan Gender Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2008.

Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remadja Rosda Karya, 1991.

- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. Ke-13, Bandung: Mizan, 1996.
- M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Tangerang: Lentera Hati, 2014.
- M.A Qosim Ja'far, *Perempuan Dan Kekuasaan; Menelusuri Hak Politik Dan Persoalan Gender Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2008.
- Mansour Fakih, "Posisi Kaum Perempuan dalam Islam", dalam Mansour Fakih, dkk., *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Mansour Fakih, "Posisi Kaum Perempuan dalam Islam", dalam Mansour Fakih, dkk., *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Marbun, B.N, *Kamus Politik* Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, cet. II Bandung: Mizan, 1997.
- Maulana Abu A'la, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Muhammad syah, Ismai, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara 1999.
- Munawar, Ahmadi Muhammad, *Prinsip-prinsip Metodologi Research*, Yogyakarta : Sumbangsih, 1975.
- Noer, Deliar, *Pengantar Ke Pemikiran Politik* , Jakarta: CV Rajawali, 1983.

Ramlan Surbakti, Didik suprianto dan Hasyim Asyari, Meningkatkan Keterwakilan Perempuan, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.

Shihab, M. Quraish , *Perempuan dari cinta sampai seks, dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah dari bias lama sampai bias baru*, Tangerang : Lentera Hati, 2014.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta 2007.

Suprpto, *Metode Riset dan Aplikasinya dalam Pemasaran*, Jakarta : Fakultas Ekonomi, 1981.

Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999.

T. May Rudy, *Pengantar Ilmu Politik: Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya*, Bandung: Refika Aditama, 2003.

Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer* (edisi Lengkap), Cetakan pertama, , Surabaya : Gitamedia Press, 2006.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 12/2003) diberlakukan sejak 11 Maret 2003. Undang-undang ini menggantikan dari UU No. 3/1999.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (UU No. 31/2002) diberlakukan sejak 27 Desember 2002. Undang-undang ini merupakan pengganti dari UU No. 2/1999.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Yusuf Al-Qardhawy, *Fiqh Daulah dalam Persepektif Al-Qur'an dan Sunnah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.